



Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pendidikan dan Agama Berbasis Pinjaman dan Hibah

**Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

Kegiatan pengendalian strategis pembiayaan program pembangunan bidang Pendidikan dan Agama berbasis bantuan dan pinjaman tahun 2023 merupakan salah satu tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) fungsi, yang salah satunya adalah pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional berbasis bantuan dan pinjaman di bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Untuk itu, pada tahun 2023 telah dilakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan rencana program pembangunan bidang

Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta upaya yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut.

Laporan pengendalian strategis pembiayaan program pembangunan bidang Pendidikan dan Agama berbasis bantuan dan pinjaman merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam pembangunan Agama, Pendidikan dan Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama pada Tahun 2023. Ruang lingkup laporan ini meliputi hasil pemantauan terhadap progress pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui SBSN dan Hibah luar negeri berupa bantuan MEQR Kementerian Agama dari World bank dan bantuan dari UNICEF, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada setiap ruang lingkup pembangunan di masing-masing Unit Eselon I Kementerian terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mitra pembangunan terkait atas kerjasamanya dalam proses koordinasi yang tetap bejalan selama pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data informasi pencapaian progress maupun perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, kami berharap bahwa laporan pengendalian strategis pembiayaan program

pembangunan bidang Pendidikan dan Agama berbasis bantuan dan pinjaman Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk memberi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, namun juga bermanfaat dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/lembaga yang terkait dalam pembangunan bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jakarta, Desember 2023

**Direktur Agama, Pendidikan dan
Kebudayaan
Kementerian PPN / Bappenas**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI 1

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang 1
- 1.2. Tujuan 3
- 1.3. Sasaran 3
- 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan 3
- 1.5. Sistematika Penulisan 4

BAB II. PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI MELALUI PEMBIAYAAN SBSN TAHUN 2023

- 2.1. Asrama Haji 5
- 2.2. Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) 7
- 2.3. Balai Nikah dan Manasik Haji 10
- 2.4. Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) 15
- 2.5. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah 16
- 2.6. Pengusulan Peoyek SBSN 22

BAB III. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PROYEK SBSN TAHUN 2023

- 3.1. Proses Pengusulan SBSN Tahun 2024 25
- 3.2. Pelaksanaan dan Pemantauan Proyek SBSN 28
 - Balai Nikah dan Manasik Haji 29
 - Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) 30
 - Asrama Haji 31
 - Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) 33
 - Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah 34
 - Kunjungan Lapangan Pemantauan Proyek 35

BAB IV. PEMBAHASAN

- 4.1. Pelaksanaan Proyek SBSN Kementerian Agama 40
- 4.2. Pelaksanaan Proyek Realizing Education's Promise Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) Kementerian Agama 53
- 4.1. Pelaksanaan Kerjasama RI-UNICEF Bidang Pendidikan 56

BAB V. PENUTUP

- Kesimpulan dan Rekomendasi 64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara pada pasal 1 ayat 1 mencantumkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disebut SBSN atau disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagai bukti atas penyertaan Aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Berdasarkan pengertian sukuk yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 diatas, bahwa sukuk merupakan surat berharga yang mempunyai landasan hukum Islam yang diterbitkan oleh pemerintah untuk kalangan dalam negeri maupun luar negeri.

Terdapat beberapa macam Sukuk/SBSN yang dikeluarkan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 pada pasal 3 yang terbagi menjadi 6 macam Sukuk berdasarkan akda yang digunakan, yakni, (1) SBSN Ijarah yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah, (2) SBSN Mudharabah yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah, (3) SBSN Istishna yang diterbitkan berdasarkan akad Istishna, (4) SBSN Musyarakah yang idterbitkan berdasarkan kaad musyarakah, (5) SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, (6) SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih akad sebagaimana yang dimaksud pada nomor satu sampai nomor lima.

Penerbitan SBSN dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk untuk membiayai proyek. Dalam proyek yang dibiayai oleh SBSN

harus menggunakan transaksi berupa akad (perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai perundangan), yang disesuaikan dengan prinsip syariah yang digunakan. Adapun penggunaan akad bertujuan untuk menghindari unsur larangan dalam prinsip syariah, yakni (1) Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang, (2) Maysir, yaitu unsur sepakulasi, judi, dan sikap untung-untungan, (3) Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya.

Pembangunan yang dapat diwujudkan melalui pembiayaan SBSN di lingkungan Kementerian Agama antara lain, pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana Madrasah, revitalisasi dan pengembangan Kantor Urusan Agama (KUA), revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji, pembangunan gedung layanan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu, dan pembangunan pusat literasi keagamaan Islam (PLKI). Selain itu, pembiayaan SBSN pada pembangunan Kementerian Agama juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi layanan pendidikan keagamaan dan agama di daerah, mengingat banyaknya satuan kerja yang berada dibawah Kementerian Agama yang tersebar di seluruh Indonesia sampai pada level Kecamatan yang semua layanan tersebut dapat didukung kinerjanya melalui dukungan pembiayaan SBSN.

Namun pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui SBSN di Kementerian Agama terbatas hanya pada kegiatan unit kerja yang masuk dalam kegiatan yang berkaitan dengan umat Islam saja. Hal tersebut dikarenakan adanya akad sebagai dasar perjanjian antara investor/pemilik modal dengan pihak pengelola yang harus memenuhi prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana tertuang dalam

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 dan diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah. Unit kerja yang menjadi penanggung jawab pembiayaan SBSN dalam pembangunan di Kementerian Agama antara lain, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji dan Umroh, dan Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam.

1.2. TUJUAN

Kegiatan Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan dan Agama Berbasis Bantuan dan Pinjaman Bidang Pembangunan Pendidikan dan Agama tahun 2023 bertujuan untuk:

Monitoring

Melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan dan Agama yang dibiayai melalui sumber pembiayaan berbasis pinjaman dan Hibah tahun 2023

Identifikasi Sumber Pembiayaan

Mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan yang digunakan pada masing-masing Kementerian terkait, seperti terdapatnya sumber pembiayaan Hibah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta sumber pembiayaan SBSN dan MEQR pada Kementerian Agama.

Evaluasi

Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui SBSN dan MEQR pada Kementerian Agama berdasarkan hasil capaian yang diperoleh serta dari temuan kendala yang dihadapi pada proses pelaksanaan pembangunan.

Penilaian Proposal SBSN

Melakukan penilaian kelayakan dokumen perencanaan (proposal) untuk pengajuan

pembiayaan SBSN pada proyek pembangunan Kementerian Agama di Tahun 2023.

1.3. SASARAN

Tercapainya Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan dan Agama Berbasis Bantuan dan Pinjaman Bidang Pembangunan Pendidikan dan Agama tahun 2023 mencakup:

- Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pembangunan Bidang Pendidikan dan Agama.
- Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Pembangunan Bidang Pendidikan & Agama.
- Ketersediaan hasil penilaian kelayakan dokumen perencanaan (proposal) pembangunan pada Kementerian Agama yang dibiayai melalui SBSN Tahun 2023.
- Memperoleh capaian progress pembangunan yang dibiayai melalui SBSN pada Kementerian Agama Tahun 2023, termasuk mengetahui kendala pada pelaksanaan pembangunan proyek.

1.4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pendidikan dan Agama Berbasis Bantuan dan Pinjaman Tahun 2023 yaitu:

Secara substansi meliputi Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama;

Secara mekanisme meliputi:

- Melakukan pengamatan perkembangan pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta penyerapan anggaran pembangunan bidang pendidikan dan agama melalui pertemuan koordinasi pemantauan pada institusi pusat yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
- Melakukan kunjungan lapangan pemantauan yang dibiayai oleh bantuan/pinjaman.
- Melakukan identifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan agama yang dibiayai oleh bantuan/pinjaman tahun 2023 sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI MELALUI PEMBIAYAAN PINJAMAN DAN HIBAH TAHUN 2023

BAB III

PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI PEMBIAYAAN PINJAMAN DAN HIBAH

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI PEMBIAYAAN PINJAMAN DAN HIBAH

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAB II

PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI MELALUI PEMBIAYAAN SBSN TAHUN 2023

2.1. ASRAMA HAJI

Salah satu tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian Agama adalah meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, salah satunya menyelenggarakan ibadah haji secara baik, aman, dan akuntabel. Asrama Haji merupakan unit teknis penyelenggaraan haji di tingkat daerah dimana peran Asrama Haji sangat penting untuk melayani jama'ah haji pada saat keberangkatan menuju Arab Saudi dan kepulangan dari Arab Saudi.

Besarnya jumlah jemaah haji yang terus meningkat harus diimbangi dengan kualitas layanan yang baik oleh pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan ibadah haji dalam hal ini Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada setiap Asrama Haji terutama Asrama Haji Embarkasi yang mencakup sejumlah kabupaten/kota disekitarnya. Peningkatan yang terus dilakukan pada Asrama Haji meliputi rehabilitasi gedung/bangunan asrama yang sudah tua dan terdapat kondisi retak di beberapa sudut dinding bangunan, pembangunan gedung asrama baru untuk memenuhi kapasitas jemaah haji ketika musim ibadah haji, dan pembangunan fasilitas sarana penunjang lainnya yang mendukung layanan kepada jemaah di Asrama Haji, utamanya bagi jemaah haji yang sudah berusia lanjut

Total Proyek Asrama Haji selama 2014-2023 adalah 87 proyek dengan total anggaran 2,31 Triliun

Selain itu fungsi Asrama Haji juga dapat dikembangkan selain untuk kegiatan ibadah, juga digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang dikelola secara islami dan syariah. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah jemaah haji dan bertambahnya usia Asrama Haji Indonesia, maka dibutuhkan adanya revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji. Selain itu Asrama Haji memiliki potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penyediaan penginapan, ruang rapat dan penyewaan aula diluar musim haji. Revitalisasi dan pengembangan asrama haji ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para jemaah haji, terutama dalam hal

penyediaan sarana akomodasi bagi para Jamaah haji di dalam negeri, masyarakat berharap adanya peningkatan kualitas layanan asrama haji agar setara dengan hotel berbintang yang memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan kesehatan.



Mengingat besarnya kebutuhan revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji dan terbatasnya dana publik yang tersedia, maka kebutuhan tersebut dipenuhi melalui SBSN. Sejarah diusulkan pembiayaan revitalisasi Asrama haji melalui SBSN adalah sebagai berikut

- Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencanangkan program revitalisasi asrama haji. Program tersebut di antaranya untuk memperjelas status kelembagaan asrama haji.
- Setahun berikutnya, Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji.
- Pada tahun 2014 Dirjen PHU Anggito Abimanyu berencana meningkatkan pelayanan kenyamanan bagi asrama haji, setara hotel bintang tiga
- Revitalisasi asrama haji tersebut di luar musim haji dapat digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat umum untuk penyelenggaraan seminar, workshop, perayaan, dan acara lain.
- revitalisasi tersebut dilakukan untuk memaksimalkan fungsi asrama haji yang memiliki tiga nilai, yakni ibadah, sosial dan ekonomi
- Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji setara bintang 3 merupakan bagian dari program utama peningkatan kepuasan layanan haji dalam negeri, sebagaimana disebutkan dalam renstra

Ditjen PHU 2020-2024, antara lain: penyederhanaan pendaftaran haji, revitalisasi dan pembangunan PLHUT, dan Revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji setara hotel bintang 3.

Berikut alokasi anggaran proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji yang dibiayai SBSN tahun 2014-2023



Pada Tahun 2023 Proyek Revitalisasi Asrama Haji melalui anggaran SBSN terdiri dari 5 Asrama Haji dengan Pagu Total Rp174,381,958,000

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ ESELON 1 PROGRAM/PAKET PEKERJAAN	LOKASI	NILAI PROYEK (Rupiah)
a	Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji		174,381,958,000
1	Asrama Haji Balikpapan	KALIMANTAN TIMUR	38,627,635,000
2	Asrama Haji Palangkaraya	KALIMANTAN TENGAH	14,283,369,400
3	Asrama Haji Banten	BANTEN	72,436,036,000
4	Asrama Haji Ternate	MALUKU UTARA	28,706,518,600
5	Asrama Haji Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	20,328,399,000

2.2 PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH TERPADU (PLHUT)

Salah satu tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Agama yang juga diatur dalam UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa Pemerintah c.q Kementerian Agama bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji regular dan ibadah umrah. Penyelenggaraan pelayanan ibadah haji regular yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota ditangani melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam melaksanakan tugasnya secara umum sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftar haji dan umrah Kementerian Agama memandang perlu melaksanakan Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) melalui pembiayaan SBSN. Tujuan revitalisasi dan pembangunan PLHUT dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para calon jamaah haji dan umrah, yang mencakup:

- Memenuhi kebutuhan standar sarana prasarana Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu;
- Memberikan pelayanan satu atap atas penyelenggaraan ibadah haji reguler, haji khusus, maupun umrah terkait proses/informasi pendaftaran, pembatalan, pelunasan BPIH, konsultasi, bimbingan manasik dan pelayanan/informasi umrah;
- Mewujudkan hak-hak masyarakat berupa pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah haji dan umrah oleh Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait.

Adapun sasaran revitalisasi dan pembangunan PLHUT untuk meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama meliputi aspek pendaftaran, bimbingan manasik haji, pemberangkatan, prosesi ibadah haji, dan pemulangan. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui program revitalisasi dan pembangunan PLHUT terus melakukan peningkatan layanan publik pada tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara bertahap melalui pembiayaan SBSN.

Berikut alokasi anggaran proyek revitalisasi dan pengembangan PLHUT yang dibiayai SBSN tahun 2023

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ ESELON 1 PROGRAM/PAKET PEKERJAAN	LOKASI	NILAI PROYEK (Rupiah)
	Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu		126,583,969,000
1	Kab. Purwakarta	JAWA BARAT	2,965,603,000
2	Kab. Sumedang	JAWA BARAT	2,595,899,000

3	Kota Banjar	JAWA BARAT	4,377,735,000
4	Kab. Grobogan	JAWA TENGAH	2,609,666,000
5	Kab. Klaten	JAWA TENGAH	2,552,726,000
6	Kab. Kudus	JAWA TENGAH	3,086,764,000
7	Kab. Purworejo	JAWA TENGAH	2,811,589,000
8	Kab. Semarang	JAWA TENGAH	3,071,377,000
9	Kab. Sukoharjo	JAWA TENGAH	2,702,510,000
10	Kab. Wonosobo	JAWA TENGAH	2,499,008,000
11	Kab. Bangkalan	JAWA TIMUR	4,059,947,000
12	Kab. Gresik	JAWA TIMUR	2,863,203,000
13	Kab. Nganjuk	JAWA TIMUR	2,196,797,000
14	Kab. Trenggalek	JAWA TIMUR	2,796,100,000
15	Kota Kediri	JAWA TIMUR	2,737,903,000
16	Kota Probolinggo	JAWA TIMUR	2,033,675,000
17	Kab. Barru	SULAWESI SELATAN	3,271,932,000
18	Kab. Luwu Timur	SULAWESI SELATAN	3,477,787,000
19	Kab. Soppeng	SULAWESI SELATAN	3,173,794,000
20	Kab. Talakar	SULAWESI SELATAN	3,091,308,000
21	Kota Palopo	SULAWESI SELATAN	3,329,957,000
22	Kab. Bener Meriah	ACEH	2,796,100,000
23	Kab. Simeulue	ACEH	2,827,054,000
24	Kota Lhokseumawe	ACEH	3,047,330,000
25	Kab. Balangan	KALIMANTAN SELATAN	3,253,260,000
26	Kab. Tapin	KALIMANTAN SELATAN	3,008,594,000
27	Kab. Mesuji	LAMPUNG	3,530,776,000
28	Kab. Pesisir Barat	LAMPUNG	3,700,139,000
29	Kab. Lombok Timur	NUSA TENGGARA BARAT	3,150,888,000
30	Kab. Lombok Utara	NUSA TENGGARA BARAT	2,343,240,000
31	Kab. Rokan Hulu	RIAU	2,766,411,000
32	Kab. Kampar	RIAU	2,673,320,000
33	Kab. Rokan Hilir	RIAU	3,833,986,000
34	Kab. Oki	SUMATERA SELATAN	3,877,728,000
35	Kota Pagaram	SUMATERA SELATAN	2,644,233,000
36	Kab. Labuhanbatu Selatan	SUMATERA UTARA	3,237,002,000
37	Kab. Labuhanbatu Utara	SUMATERA UTARA	3,045,914,000
38	Kab. Tapanuli Tengah	SUMATERA UTARA	4,380,585,000
39	Kab. Barito Timur	KALIMANTAN TENGAH	2,720,844,000
40	Kab. Kutai Barat	KALIMANTAN TIMUR	4,429,441,000
41	Kota Tanjungpinang	KEPULAUAN RIAU	2,716,214,000

Jumlah proyek SBSN PLHUT masih konsisten selama 3 tahun dengan jumlah 55 proyek

42	Kab. Banggai Kepulauan	SULAWESI TENGAH	3,670,102,000
43	Kab. Pasaman	SUMATERA BARAT	3,604,125,000
44	Kota Padang Panjang	SUMATERA BARAT	2,406,239,000
45	Kab. Kulon Progo	D.I YOGYAKARTA	2,664,487,000
46	Kab. Kaur	BENGGKULU	2,860,973,000
47	Kota Bengkulu	BENGGKULU	2,882,620,000
48	Kab. Boalemo	GORONTALO	3,023,668,000
49	Kab. Buru Selatan	MALUKU	4,123,364,000
50	Kab. Pulau Morotai	MALUKU UTARA	4,727,652,000
51	Kab. Flores Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	2,608,303,000
52	Kab. Fakfak	PAPUA BARAT	5,857,644,000
53	Kab. Teluk Wondama	PAPUA BARAT	4,071,067,000
54	Kab. Majene	SULAWESI BARAT	2,577,778,000
55	Kab. Bolaang Mongondow	SULAWESI UTARA	2,477,639,000

2.3 BALAI NIKAH DAN MANASIK HAJI

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, sebagai salah satu sarana pelayanan publik Kementerian Agama dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. KUA berkedudukan di wilayah kecamatan yang secara langsung berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

KUA mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Pelayanan dan bimbingan masyarakat:

- Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
- Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
- Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler; dan
- Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kua kecamatan

Usulan KUA diprioritaskan pada daerah yang belum memiliki kantor, daerah bencana dan peristiwa menikah tinggi

Selain itu, KUA dapat mengoptimalkan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas keagamaan umat Islam di wilayah KUA Kecamatan berada, agar dapat mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umat Islam yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan. Penekanan kegiatan yang dapat dioptimalkan dapat difokuskan pada kegiatan yang masih jarang mendapat perhatian

khusus seperti pemanfaatan wakaf dan zakat yang berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat.

Total KUA saat ini berjumlah 5.945 KUA, bertugas mencatat \pm 2juta peristiwa nikah setiap tahun dan layanan lainnya. KUA dituntut memberikan pelayanan prima dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan dedikasi yang tinggi sesuai dengan slogan 5 Nilai Budaya Kerja (integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab, dan keteladanan). Masalah yang dihadapi 5.945 KUA selain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan biaya operasional, masalah kepemilikan/asset tanah dan masih banyak yang berdiri dan menempati tanah wakaf, milik Pemerintah Daerah (Pemda), dan sewa. Lewat program Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji yang dibiayai dari sumber pembiayaan SBSN ini membantu sekali dalam mewujudkan sarana layanan gedung KUA yang representatif dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Masalah yang dihadapi KUA selain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan biaya operasional, masalah kepemilikan/asset tanah dan masih banyak yang berdiri dan menempati tanah wakaf, milik Pemerintah Daerah (Pemda), dan sewa. Lewat program Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji yang dibiayai dari sumber pembiayaan SBSN bermaksud mewujudkan sarana layanan gedung KUA yang representatif dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berikut alokasi anggaran proyek Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji yang dibiayai SBSN tahun 2023

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ ESELON 1 PROGRAM/PAKET PEKERJAAN	LOKASI	NILAI PROYEK (Rupiah)
	Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji		254,010,000,000
1	Kec. Bandar Dua, Pidie Jaya	ACEH	1,730,000,000
2	Kec. Kuala Baru, Aceh Singkil	ACEH	1,550,000,000
3	Kec. Kluet Utara, Aceh Selatan	ACEH	1,500,000,000
4	Kec. Geumpang, Pidie	ACEH	1,450,000,000
5	Kec. Lhoksukon, Aceh Utara	ACEH	1,700,000,000
6	Kec. Badiri, Tapanuli Tengah	SUMATERA UTARA	1,250,000,000
7	Kec. Lumut, Tapanuli Tengah	SUMATERA UTARA	1,250,000,000
8	Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi	SUMATERA UTARA	1,450,000,000
9	Kec. Rantau Selatan, Labuhanbatu	SUMATERA UTARA	1,400,000,000
10	Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	SUMATERA BARAT	1,400,000,000
11	Kec. Sitiung, Dharmasraya	SUMATERA BARAT	1,450,000,000
12	Kec. Padang Timur, Kota Padang	SUMATERA BARAT	1,400,000,000
13	Kec. Talamau, Pasaman Barat	SUMATERA BARAT	1,300,000,000

14	Kec. Tigo Nagari, Pasaman	SUMATERA BARAT	1,400,000,000
15	Kec. Mandau , Bengkulu	RIAU	1,750,000,000
16	Kec. Sentajo Raya, Kuantan Singingi	RIAU	1,420,000,000
17	Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai	RIAU	1,550,000,000
18	Kec. Rimba Melintang, Rokan Hilir	RIAU	1,450,000,000
19	Kec. Sagulung, Kota Batam	KEPULAUAN RIAU	1,500,000,000
20	Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang	KEPULAUAN RIAU	1,550,000,000
21	Kec. Singkep Pesisir, Lingga	KEPULAUAN RIAU	1,450,000,000
22	Kec. Singkut, Sarolangun	JAMBI	1,400,000,000
23	Kec. Mendahara, Tanjung Jabung Timur	JAMBI	1,450,000,000
24	Kec. Bathin XXIV, Batanghari	JAMBI	1,420,000,000
25	Kec. Selebar, Kota Bengkulu	BENGGKULU	1,450,000,000
26	Kec. Air Padang, Bengkulu Utara	BENGGKULU	1,450,000,000
27	Kec. Taba Penanjung, Bengkulu Tengah	BENGGKULU	1,550,000,000
28	Kec. Pinang Berlapis, Lebong	BENGGKULU	1,550,000,000
29	Kec. Nasal, Kaur	BENGGKULU	1,700,000,000
30	Kec. Karang Jaya, Musi Rawas Utara	SUMATERA SELATAN	1,550,000,000
31	Kec. Muara Jaya, Ogan Komering Hulu	SUMATERA SELATAN	1,400,000,000
32	Kec Sungai Pinang, Ogan Ilir	SUMATERA SELATAN	1,450,000,000
33	Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja, Ogan Komering Ulu Timur	SUMATERA SELATAN	1,400,000,000
34	Kec. Muara Enim, Muara Enim	SUMATERA SELATAN	1,650,000,000
35	Kec. Muntok, Bangka Barat	KEP. BANGKA BELITUNG	1,600,000,000
36	Kec. Simpang Teritip, Bangka Barat	KEP. BANGKA BELITUNG	1,600,000,000
37	Kec. Balik Bukit, Lampung Barat	LAMPUNG	1,400,000,000
38	Kec. Sukoharjo, Pringsewu	LAMPUNG	1,400,000,000
39	Kec. Abung Semuli, Lampung Utara	LAMPUNG	1,420,000,000
40	Kec. Sekampung, Lampung Timur	LAMPUNG	1,200,000,000
41	Kec. Ngambur, Pesisir Barat	LAMPUNG	1,300,000,000
42	Kec. Kasemen, Serang	BANTEN	1,300,000,000
43	Kec. Panggarangan, Lebak	BANTEN	1,400,000,000
44	Kec. Gedong, Lebak	BANTEN	1,400,000,000
45	Kec. Cipicung, Kuningan	JAWA BARAT	1,420,000,000
46	Kec. Wanayasa, Purwakarta	JAWA BARAT	1,450,000,000

47	Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	JAWA BARAT	1,350,000,000
48	Kec. Terisi, Indramayu	JAWA BARAT	1,400,000,000
49	Kec. Garut, Kota Garut	JAWA BARAT	1,400,000,000
50	Kec. Panumbangan, Ciamis	JAWA BARAT	1,350,000,000
51	Kec. Harjamukti, Kota Cirebon	JAWA BARAT	1,350,000,000
52	Kec. Plumbon, Cirebon	JAWA BARAT	1,420,000,000
53	Kec. Ciawi, Bogor	JAWA BARAT	3,101,000,000
54	Kec. Tanjung, Brebes	JAWA TENGAH	1,700,000,000
55	Kec. Wonokerto, Pekalongan	JAWA TENGAH	1,550,000,000
56	Kec. Klego, Boyolali	JAWA TENGAH	1,550,000,000
57	Kec. Karangmalang, Sragen	JAWA TENGAH	1,200,000,000
58	Kec. Sulang, Rembang	JAWA TENGAH	1,420,000,000
59	Kec. Adimulyo, Kebumen	JAWA TENGAH	1,250,000,000
60	Kec. Donorojo, Jepara	JAWA TENGAH	1,250,000,000
61	Kec. Plantungan, Kendal	JAWA TENGAH	1,250,000,000
62	Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	D.I YOGYAKARTA	1,850,000,000
63	Kec. Semanu, Gunungkidul	D.I YOGYAKARTA	1,550,000,000
64	Kec. Bendo, Magetan	JAWA TIMUR	1,400,000,000
65	Kec. Maospati, Magetan	JAWA TIMUR	1,350,000,000
66	Kec. Kwadungan, Ngawi	JAWA TIMUR	1,300,000,000
67	Kec. Tandes, Kota Surabaya	JAWA TIMUR	1,400,000,000
68	Kec. Sukodadi, Lamongan	JAWA TIMUR	1,350,000,000
69	Kec. Nglames, Madiun	JAWA TIMUR	1,250,000,000
70	Kec. Sukodono, Lumajang	JAWA TIMUR	1,400,000,000
71	Kec. Talun, Blitar	JAWA TIMUR	1,420,000,000
72	Kec. Kuta, Badung	BALI	1,450,000,000
73	Kec. Gerokgak, Buleleng	BALI	1,400,000,000
74	Kec. Lantung, Sumbawa	NUSA TENGGARA BARAT	1,550,000,000
75	Kec. Manggelawa, Dompu	NUSA TENGGARA BARAT	1,550,000,000
76	Kec. Sekarbela, Kota Mataram	NUSA TENGGARA BARAT	1,450,000,000
77	Kec. Ende Timur, Ende	NUSA TENGGARA TIMUR	1,450,000,000
78	Kec. Nubatukan, Lembata	NUSA TENGGARA TIMUR	1,450,000,000
79	Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak	KALIMANTAN BARAT	1,400,000,000
80	Kec. Sebawi, Sambas	KALIMANTAN BARAT	1,400,000,000
81	Kec. Pinoh Selatan, Melawi	KALIMANTAN BARAT	1,420,000,000
82	Kec. Sengah Temila, Landak	KALIMANTAN BARAT	1,420,000,000
83	Kec. Tayan Hulu, Sanggau	KALIMANTAN BARAT	1,420,000,000

84	Kec. Serawai, Sintang	KALIMANTAN BARAT	1,400,000,000
85	Kec. Gunung Timang, Barito Utara	KALIMANTAN TENGAH	1,420,000,000
86	Kec. Dusun Utara, Barito Selatan	KALIMANTAN TENGAH	1,400,000,000
87	Kec. Balai Riam, Sukamara	KALIMANTAN TENGAH	1,400,000,000
88	Kec. Tatah Makmur, Banjar	KALIMANTAN SELATAN	1,400,000,000
89	Kec. Daha Utara, Hulu Sungai Selatan	KALIMANTAN SELATAN	1,420,000,000
90	Kec. Muara Harus, Tabalong	KALIMANTAN SELATAN	1,400,000,000
91	Kec. Angsana, Tanah Bumbu	KALIMANTAN SELATAN	1,400,000,000
92	Kec. Pamukan Barat, Kotabaru	KALIMANTAN SELATAN	1,400,000,000
93	Kec. Jejangkit, Barito Kuala	KALIMANTAN SELATAN	1,400,000,000
94	Kec. Batu Ampar, Kutai Timur	KALIMANTAN TIMUR	1,550,000,000
95	Kec. Batu Engau, Paser	KALIMANTAN TIMUR	1,750,000,000
96	Kec. Anggana, Kutai Kartanegara	KALIMANTAN TIMUR	1,650,000,000
97	Kec. Barong Tongkok, Kutai Barat	KALIMANTAN TIMUR	1,650,000,000
98	Kec. Peso Hilir, Bulungan	KALIMANTAN UTARA	1,750,000,000
99	Kec Sebatik Utara, Kab Nunukan	KALIMANTAN UTARA	1,650,000,000
100	Kec. Malinau Kota, Malinau	KALIMANTAN UTARA	1,550,000,000
101	Kec Sebatik Tengah, Nunukan	KALIMANTAN UTARA	1,650,000,000
102	Kec. Tilamuta, Boalemo	GORONTALO	1,400,000,000
103	Kec. Lemito, Pohuwato	GORONTALO	1,400,000,000
104	Kec. Sipatana, Kota Gorontalo	GORONTALO	1,400,000,000
105	Kec. Tolangohula, Gorontalo	GORONTALO	1,410,000,000
106	Kec. Pinolosian, Bolaang Mongondow Selatan	SULAWESI UTARA	1,500,000,000
107	Kec. Airmadidi, Minahasa Utara	SULAWESI UTARA	1,420,000,000
108	Kec. Buko, Banggai Kepulauan	SULAWESI TENGAH	1,420,000,000
109	Kec. Basidondo, Tolitoli	SULAWESI TENGAH	1,852,000,000
110	Kec. Sindue Tambosabora, Donggala	SULAWESI TENGAH	1,550,000,000
111	Kec. Poso Kota Utara, Poso	SULAWESI TENGAH	1,200,000,000
112	Kec. Banggai Tengah, Banggai Laut	SULAWESI TENGAH	1,441,000,000
113	Kec. Budong Budong, Mamuju Tengah	SULAWESI BARAT	1,441,000,000

114	Kec. Bala Nipa, Polewali Mandar	SULAWESI BARAT	1,441,000,000
115	Kec. Bambaيرا, Pasangkayu	SULAWESI BARAT	1,441,000,000
116	Kec. Mambi, Mamasa	SULAWESI BARAT	1,441,000,000
117	Kec. Sukamaju, Luwu Utara	SULAWESI SELATAN	1,410,000,000
118	Kec. Ponrang Selatan, Luwu	SULAWESI SELATAN	1,440,000,000
119	Kec. Soreang, Kota Parepare	SULAWESI SELATAN	1,400,000,000
120	Kec. Benteng, Kepulauan Selayar	SULAWESI SELATAN	1,500,000,000
121	Kec. Burau, Luwu Timur	SULAWESI SELATAN	1,440,000,000
122	Kec. Tompobulu, Bantaeng	SULAWESI SELATAN	1,440,000,000
123	Kec. Unaaha, Konawe	SULAWESI TENGGARA	1,420,000,000
124	Kec. Lalembuu, Konawe Selatan	SULAWESI TENGGARA	1,420,000,000
125	Kec. Wawonii Selatan, Konawe Kepulauan	SULAWESI TENGGARA	1,735,000,000
126	Kec. Lealea, Kota Baubau	SULAWESI TENGGARA	1,500,000,000
127	Kec. Tutuk Tolu, Seram Bagian Timur	MALUKU	1,410,000,000
128	Kec. Taniwel, Seram Bagian Barat	MALUKU	1,410,000,000
129	Kec. Dullah Selatan, Kota Tual	MALUKU	1,820,000,000
130	Kec. Taliabu Selatan, Pulau Taliabu	MALUKU UTARA	1,425,000,000
131	Kec. Gane Barat Utara, Halmahera Selatan	MALUKU UTARA	1,400,000,000
132	Kec. Jailolo Timur, Halmahera Barat	MALUKU UTARA	1,410,000,000
133	Kec. Mayamuk, Sorong	PAPUA BARAT	2,222,000,000
134	Kec. Salawati Selatan, Sorong	PAPUA BARAT	1,600,000,000
135	Kec. Arso, Keerom	PAPUA	2,220,000,000

2.4 PUSAT LITERASI KEAGAMAAN ISLAM

Unit Percetakan Al-Quran merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Sedangkan secara teknis dan administratif UPQ berada di bawah Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Tugas dan fungsi satuan kerja Unit Percetakan Al-Qur'an adalah menyelenggarakan penerbitan, percetakan dan pendistribusian mushaf Al-Qur'an, serta pemberian pelayanan jasa percetakan kepada masyarakat yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Agama cq. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang tugas dan fungsinya meliputi bimbingan dan layanan bagi masyarakat perlu memberikan perhatian terhadap pengelolaan layanan percetakan mushaf Al-Qur'an baik dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran maupun manajemen pengelolaan.

Usulan pengembangan UPQ menjadi Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) melalui pembiayaan SBSN adalah hasil dari diskusi panjang yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam dan UPT UPQ. Pemikiran pengembangan UPQ menjadi PLKI didasari pada pemikiran berikut:

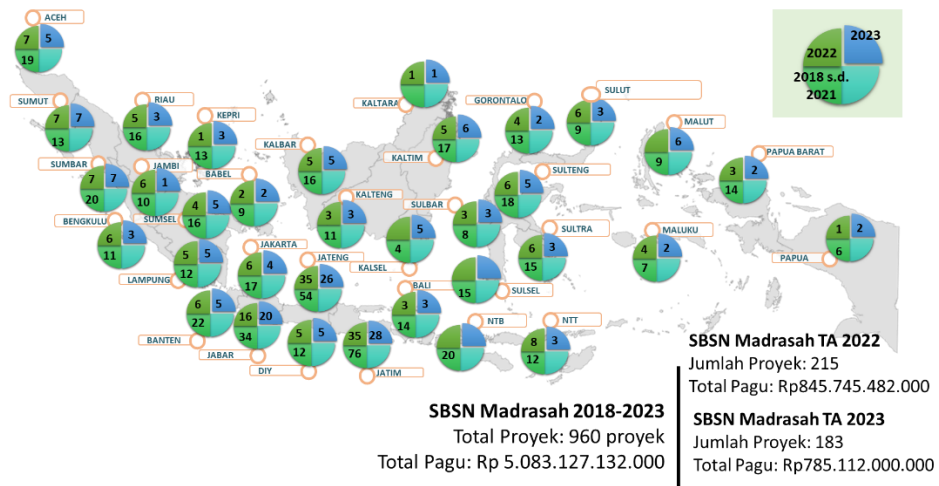
- Penguasaan ilmu pengetahuan adalah kunci kemajuan peradaban;
- Literasi keagamaan merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan;
- Mengembangkan literasi = memajukan peradaban;;

Pada Tahun 2023 dilakukan pembangunan area produksi melalui anggaran SBSN sebesar Rp54.010.000.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut

NO	ITEM	BIAYA	KETERANGAN
1	BIAYA KONSTRUKSI BANGUNAN	43.600.000.000	
2	BIAYA PERENCANAAN/DED	2.883.460.000	
3	BIAYA PENGAWASAN	1.707.934.000	
4	BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN	466.263.658	
	TOTAL	48.657.657.658	
	PPN 11%	5.352.342.342	
TOTAL BIAYA		54.010.000.000	

2.5 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU MADRASAH

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan mutu Madrasah. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan Islam khususnya pendidikan madrasah harus didukung dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran dan pembiayaan pendidikan, tata kelola dan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan melalui peningkatan Akses dan Mutu Madrasah.



Ruang Lingkup SBSN TA 2023 Madrasah berfokus pada penyediaan Sarpras Primer; RKB dan Lab Terpadu beserta Perpustakaan

Madrasah merupakan satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah. Madrasah sebagai salah satu representasi lembaga Pendidikan Islam yang memiliki kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan nasional. Tantangan yang dihadapi oleh madrasah baik tantangan dari dalam maupun dari luar yang semakin kompleks, sehingga menuntut perlunya ada upaya peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prasyarat dalam memasuki era globalisasi. Secara khusus, keberadaan madrasah sebagai salah satu Pendidikan Islam tidak lepas dari prasyarat untuk memasuki era globalisasi. Untuk itu, peningkatan kualitas merupakan agenda utama dalam meningkatkan mutu madrasah agar dapat bertahan dalam menghadapi budaya di era global.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ ESELON 1 PROGRAM/PAKET PEKERJAAN	LOKASI	NILAI PROYEK (Rupiah)
	Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Negeri		785,112,000,000
1	MAN 2 PIDIE	ACEH	3,817,297,000
2	MIN 7 PIDIE JAYA	ACEH	3,654,524,000
3	MTSN 4 PIDIE	ACEH	3,695,735,000
4	MIN 1 ACEH BESAR	ACEH	3,587,722,000
5	MTSN 8 ACEH UTARA	ACEH	3,894,114,000
6	MIN 5 JEMBRANA	BALI	3,830,149,000
7	MIN 5 BULELENG	BALI	3,705,523,000
8	MTSN 3 JEMBRANA	BALI	7,956,823,000
9	MAN 1 TANGERANG	BANTEN	4,253,205,000
10	MAN 2 LEBAK	BANTEN	3,512,042,000
11	MTSN 4 PANDEGLANG	BANTEN	3,452,547,000
12	MTSN 2 KOTA CILEGON	BANTEN	3,869,986,000
13	MAN 3 LEBAK	BANTEN	3,512,042,000

14	MAN 1 MUKOMUKO	BENGKULU	3,890,541,000
15	MIN 3 MUKOMUKO	BENGKULU	3,538,518,000
16	MAN BINTUHAN KAB.KAUR	BENGKULU	3,973,289,000
17	MAN 3 BANTUL	D.I YOGYAKARTA	7,558,157,000
18	MAN 1 SLEMAN	D.I YOGYAKARTA	3,180,794,000
19	MTSN 4 SLEMAN	D.I YOGYAKARTA	3,915,560,000
20	MTSN 4 GUNUNG KIDUL	D.I YOGYAKARTA	4,056,494,000
21	MAN 5 SLEMAN	D.I YOGYAKARTA	3,180,794,000
22	MAN 19 JAKARTA	DKI JAKARTA	4,946,857,000
23	MTSN 37 JAKARTA	DKI JAKARTA	4,696,059,000
24	MTSN 11 JAKARTA	DKI JAKARTA	4,696,059,000
25	MTSN 40 JAKARTA	DKI JAKARTA	4,696,059,000
26	MTSN 2 BOALEMO	GORONTALO	3,817,903,000
27	MTSN 1 BONE BOLANGO	GORONTALO	3,754,712,000
28	MTSN 7 KERINCI	JAMBI	3,856,966,000
29	MAN 3 BOGOR	JAWA BARAT	4,731,872,000
30	MAN 1 CIREBON	JAWA BARAT	4,286,858,000
31	MAN 3 CIANJUR	JAWA BARAT	4,117,800,000
32	MAN 2 KUNINGAN	JAWA BARAT	3,933,696,000
33	MIN 1 SUKABUMI	JAWA BARAT	3,669,608,000
34	MTSN 1 SUMEDANG	JAWA BARAT	3,986,410,000
35	MTSN 2 KOTA BANJAR	JAWA BARAT	3,742,457,000
36	MTSN 4 KAB. BANDUNG BARAT	JAWA BARAT	4,347,937,000
37	MTSN 2 GARUT	JAWA BARAT	3,686,925,000
38	MTSN 15 CIAMIS	JAWA BARAT	3,643,266,000
39	MAN 3 GARUT	JAWA BARAT	7,185,211,000
40	MAN 2 MAJALENGKA	JAWA BARAT	4,163,726,000
41	MAN 1 PANGANDARAN	JAWA BARAT	2,838,485,000
42	MAN 3 CIAMIS	JAWA BARAT	3,763,056,000
43	MTSN KOTA CIMAH	JAWA BARAT	4,065,686,000
44	MAN 1 MAJALENGKA	JAWA BARAT	4,163,726,000
45	MTSN 13 INDRAMAYU	JAWA BARAT	4,259,470,000
46	MTSN 1 PANGANDARAN	JAWA BARAT	3,491,610,000
47	MAN 1 KOTA TASIKMALAYA	JAWA BARAT	7,766,947,000
48	MTSN 4 BOGOR	JAWA BARAT	8,950,084,000
49	MAN 2 CILACAP	JAWA TENGAH	7,103,512,000
50	MAN 1 KLATEN	JAWA TENGAH	3,872,329,000
51	MAN 2 TEGAL	JAWA TENGAH	3,969,330,000
52	MAN 2 BREBES	JAWA TENGAH	7,536,220,000
53	MAN KOTA TEGAL	JAWA TENGAH	4,084,146,000
54	MAN 2 WONOSOBO	JAWA TENGAH	4,018,424,000
55	MIN 3 SUKOHARJO	JAWA TENGAH	3,546,420,000
56	MIN 2 BATANG	JAWA TENGAH	3,540,672,000
57	MIN 1 KLATEN	JAWA TENGAH	3,521,996,000

58	MIN 1 KAB. BOYOLALI	JAWA TENGAH	3,616,813,000
59	MIN 2 KARANGANYAR	JAWA TENGAH	3,725,994,000
60	MIN 1 TEMANGGUNG	JAWA TENGAH	3,613,581,000
61	MTSN 3 BOYOLALI	JAWA TENGAH	3,850,073,000
62	MTSN 1 PURBALINGGA	JAWA TENGAH	3,514,204,000
63	MTSN 2 BANJARNEGARA	JAWA TENGAH	7,145,875,000
64	MAN 3 KEBUMEN	JAWA TENGAH	3,974,081,000
65	MTSN 2 PEMALANG	JAWA TENGAH	3,817,903,000
66	MTSN 3 SUKOHARJO	JAWA TENGAH	3,775,011,000
67	MIN 1 BANYUMAS	JAWA TENGAH	3,415,330,000
68	MAN 2 KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH	8,136,620,000
69	MAN 2 GROBOGAN	JAWA TENGAH	4,012,089,000
70	MAN 3 CILACAP	JAWA TENGAH	3,765,430,000
71	MTSN 3 GROBOGAN	JAWA TENGAH	3,884,157,000
72	MAN 1 KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH	4,068,310,000
73	MTSN 3 PURWOREJO	JAWA TENGAH	3,788,414,000
74	MTSN 2 SURABAYA	JAWA TIMUR	4,216,578,000
75	MAN SAMPANG	JAWA TIMUR	4,106,318,000
76	MTSN 6 PASURUAN	JAWA TIMUR	7,978,950,000
77	MIN 2 MADIUN	JAWA TIMUR	3,715,220,000
78	MIN 3 PONOROGO	JAWA TIMUR	3,761,911,000
79	MIN 5 PONOROGO	JAWA TIMUR	3,761,911,000
80	MIN 2 GRESIK	JAWA TIMUR	5,546,175,000
81	MIN 10 BLITAR	JAWA TIMUR	3,512,299,000
82	MTSN 1 KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR	4,216,578,000
83	MTSN 2 MADIUN	JAWA TIMUR	3,955,007,000
84	MTSN KOTA BATU	JAWA TIMUR	3,903,688,000
85	MTSN 3 PACITAN	JAWA TIMUR	3,877,262,000
86	MTSN 4 PASURUAN	JAWA TIMUR	3,989,475,000
87	MTSN 2 NGANJUK	JAWA TIMUR	3,990,241,000
88	MTSN 2 NGAWI	JAWA TIMUR	3,827,860,000
89	MTSN 4 JOMBANG	JAWA TIMUR	3,956,156,000
90	MIN BANYUWANGI	JAWA TIMUR	3,796,028,000
91	MAN BANGKALAN	JAWA TIMUR	4,321,699,000
92	MTSN BANGKALAN	JAWA TIMUR	4,183,642,000
93	MAN 1 LAMONGAN	JAWA TIMUR	8,141,406,000
94	MTSN 1 LAMONGAN	JAWA TIMUR	8,141,406,000
95	MIN 2 MAGETAN	JAWA TIMUR	3,791,360,000
96	MIN 2 KOTA MALANG	JAWA TIMUR	3,719,172,000
97	MIN 1 JOMBANG	JAWA TIMUR	3,716,297,000
98	MTSN 1 KOTA MADIUN	JAWA TIMUR	3,824,030,000
99	MAN 1 GRESIK	JAWA TIMUR	4,602,801,000
100	MTSN 2 PAMEKASAN	JAWA TIMUR	4,146,494,000
101	MIN 2 MEMPAWAH	KALIMANTAN BARAT	3,910,598,000

102	MAN MELAWI	KALIMANTAN BARAT	4,699,803,000
103	MIN KAB. KAYONG UTARA	KALIMANTAN BARAT	4,168,110,000
104	MAN KUBU RAYA	KALIMANTAN BARAT	4,234,200,000
105	MIN 1 SINTANG	KALIMANTAN BARAT	4,356,306,000
106	MAN 4 BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	3,971,309,000
107	MIN 3 TANAH LAUT	KALIMANTAN SELATAN	3,437,596,000
108	MTSN 4 BALANGAN	KALIMANTAN SELATAN	4,211,215,000
109	MTSN 8 BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	3,844,711,000
110	MAN IC TANAH LAUT	KALIMANTAN SELATAN	8,556,372,000
111	MAN BARITO UTARA	KALIMANTAN TENGAH	4,091,669,000
112	MIN 2 MURUNG RAYA	KALIMANTAN TENGAH	4,090,893,000
113	MTSN 2 KOTAWARINGIN TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	3,839,731,000
114	MAN 1 SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	4,230,242,000
115	MIN 1 KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	3,911,316,000
116	MTSN KUTAI BARAT	KALIMANTAN TIMUR	4,578,870,000
117	MTSN 1 KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	4,164,111,000
118	MTSN 3 PENAJAM PASER UTARA	KALIMANTAN TIMUR	4,164,111,000
119	MIN 1 PASER	KALIMANTAN TIMUR	3,876,479,000
120	MTSN TANJUNG PALAS	KALIMANTAN UTARA	4,045,770,000
121	MIN 2 BANGKA	KEP. BANGKA BELITUNG	3,733,896,000
122	MTSN 3 BANGKA	KEP. BANGKA BELITUNG	3,974,922,000
123	MAN TANJUNGPINANG	KEPULAUAN RIAU	8,639,171,000
124	MIN KEPULAUAN ANAMBAS	KEPULAUAN RIAU	4,886,054,000
125	MTSN SINGKEP KAB. LINGGA	KEPULAUAN RIAU	4,636,315,000
126	MTSN 2 LAMPUNG UTARA	LAMPUNG	3,388,972,000
127	MIN 1 KALIANDA	LAMPUNG	3,315,484,000
128	MIN 1 TULANG BAWANG	LAMPUNG	3,431,132,000
129	MTSN 1 BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	3,537,948,000
130	MTSN 1 WAY KANAN	LAMPUNG	3,634,074,000
131	MIN 1 TUAL	MALUKU	4,653,324,000
132	MTSN 1 MALUKU TENGGARA	MALUKU	4,971,034,000
133	MAN 1 KAB. HALMAHERA UTARA	MALUKU UTARA	4,476,503,000

134	MTSN 2 KAB. HALMAHERA SELATAN	MALUKU UTARA	4,460,914,000
135	MTSN 1 HALMAHERA TIMUR	MALUKU UTARA	4,401,552,000
136	MIN 2 KAB. PULAU MOROTAI	MALUKU UTARA	4,000,387,000
137	MAN 1 KOTA TERNATE	MALUKU UTARA	4,859,359,000
138	MIN 4 KOTA TIDORE KEPULAUAN	MALUKU UTARA	3,967,704,000
139	MAN SUMBA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	7,372,819,000
140	MAN KEDANG KAB.LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	4,070,289,000
141	MIN MANGGARAI BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	3,696,544,000
142	MIN KOTA JAYAPURA	PAPUA	4,430,292,000
143	MTSN KOTA JAYAPURA	PAPUA	4,717,507,000
144	MIN SORONG	PAPUA BARAT	4,274,419,000
145	MIN KAIMANA	PAPUA BARAT	4,368,876,000
146	MAN 3 PEKANBARU	RIAU	3,734,550,000
147	MTSN 1 KOTA DUMAI	RIAU	3,902,539,000
148	MIN 2 INDRAGIRI HULU	RIAU	3,590,595,000
149	MTSN 2 MAJENE	SULAWESI BARAT	3,312,761,000
150	MIN 1 MAJENE	SULAWESI BARAT	3,112,923,000
151	MAN PASANGKAYU	SULAWESI BARAT	3,751,651,000
152	MTSN 3 DONGGALA	SULAWESI TENGAH	3,414,249,000
153	MTSN 4 PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH	3,343,398,000
154	MTSN 2 BANGGAI KEPULAUAN	SULAWESI TENGAH	3,825,178,000
155	MAN 2 BANGGAI	SULAWESI TENGAH	3,951,116,000
156	MTSN 2 TOJO UNA-UNA	SULAWESI TENGAH	3,506,163,000
157	MTSN 3 BUTON	SULAWESI TENGGARA	4,194,748,000
158	MTSN 3 MUNA	SULAWESI TENGGARA	7,654,988,000
159	MTSN 3 KONAWA	SULAWESI TENGGARA	3,696,882,000
160	MTSN 1 KOTA MANADO	SULAWESI UTARA	4,346,788,000
161	MTSN 3 BOLAANG MONGONDOW TIMUR	SULAWESI UTARA	4,076,410,000
162	MTSN 2 KOTA KOTAMOBAGU	SULAWESI UTARA	7,724,584,000
163	MAN 2 PESISIR SELATAN	SUMATERA BARAT	3,767,410,000
164	MAN 2 AGAM	SUMATERA BARAT	3,623,690,000
165	MTSN 2 KOTA PADANG	SUMATERA BARAT	3,673,521,000
166	MTSN 6 KOTA PADANG	SUMATERA BARAT	3,673,521,000
167	MTSN 7 KOTA PADANG	SUMATERA BARAT	3,673,521,000
168	MIN 2 DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT	3,620,403,000
169	MAN 2 SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT	3,011,030,000

170	MAN 1 OKI	SUMATERA SELATAN	3,780,871,000
171	MAN 1 LUBUK LINGGAU	SUMATERA SELATAN	3,414,250,000
172	MIN 1 MUARA ENIM	SUMATERA SELATAN	3,611,066,000
173	MTSN 1 PALI	SUMATERA SELATAN	3,899,093,000
174	MTSN JAMBAT BALO	SUMATERA SELATAN	3,814,073,000
175	MIN BLORA	JAWA TENGAH	3,561,504,000
176	MTSN 2 SAMPANG	JAWA TIMUR	3,975,305,000
177	MAN 2 LANGKAT	SUMATERA UTARA	4,056,828,000
178	MIN 6 KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA	3,677,868,000
179	MAN 1 KOTA PADANG SIDIMPUAN	SUMATERA UTARA	4,061,974,000
180	MTSN 2 LANGKAT	SUMATERA UTARA	3,927,432,000
181	MTSN 1 LANGKAT	SUMATERA UTARA	3,927,432,000
182	MAN ASAHAN	SUMATERA UTARA	3,896,084,000
183	MTSN 2 DELI SERDANG	SUMATERA UTARA	3,750,499,000

2.5 PENGUSULAN PROYEK SBSN

Pengusulan Proyek SBSN dimulai dari T-1 tahun proyek, Usulan disampaikan oleh **Menteri Agama atau Sekjen a.n. Menteri Agama** kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk dilakukan penilaian dan pembahasan dalam *trilateral meeting* (TM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Hasil dari penilaian proposal dan pembahasan TM dijadikan sebagai dasar penetapan Daftar Penerima Proyek (DPP) SBSN.

Dokumen yang disertakan dalam surat Usulan:

- Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP) untuk masing-masing Proyek
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk masing-masing Proyek
- Dokumen pendukung, antara lain:
 1. Salinan sertifikat tanah lahan yang dibangun atas nama Kementerian Agama
 2. Foto lokasi yang akan dibangun dari empat sisi, termasuk apabila ada bangunan lama yang berdiri di atasnya
 3. Rincian RAB
 4. Gambar desain struktur dan gambar kerja
 5. Surat pengusulan berjenjang (dari satker, KanKemenag, Kanwil Kemenag)
 6. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak atas kebenaran informasi yang disampaikan
 7. Dokumen pendukung lainnya yang diatur oleh Kemenag

- Mekanisme penyampaian dokumen usulan sesuai kesepakatan antarpihak (satker dengan Unit Utama, Unit Utama dengan Setjen, Setjen dengan Bappenas, misal: GDrive, Cloud milik K/L)
- Batas pengajuan usulan ke Bappenas pada minggu kedua bulan Januari T-1 pelaksanaan proyek

Dalam pengusulan proyek, kelengkapan dan isi dokumen usulan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Permen PPN 8 Tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas dengan menyertakan dokumen Studi Pendahuluan sebagai dasar penetapan sasaran proyek.

Dokumen Studi Pendahuluan harus memuat rencana jangka menengah minimal 3 tahun kedepan, dan menjelaskan poin-poin berikut:

STUDI PENDAHULUAN

1. Analisis kebutuhan program.
2. Keterkaitan program dengan tugas, fungsi dan kewenangan Pemrakarsa Proyek.
3. Tujuan program dan keterkaitannya dengan RPJMN, RenstraK/L, dan/atau prioritas pembangunan nasional.
4. Ruang lingkup program.
5. Indikasi lokasi
6. Indikasi biaya dan potensi pemfaatan
7. Indikasi manfaat dan dampak Ekonomi/Sosial.
8. Indikasi jadwal implementasi

Dokumen KAK dan DSKP harus spesifik menjelaskan kondisi dan kebutuhan proyek yang diusulkan, muatan dalam dokumen harus menjelaskan poin-poin berikut:

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

1. Latar Belakang dan Alasan Pengusulan Proyek
2. Maksud dan Tujuan Proyek
3. Kesesuaian Proyek dengan RPJMN/ Renstra/RKP dan/atau Prioritas Pembangunan
4. Kesesuaian lokasi Proyek dengan RTRW, sesuai kebutuhan Proyek
5. Keterkaitan antarProyek, antarsektor, antarwilayah, sesuai kebutuhan Proyek
6. Ruang Lingkup dan Komponen Proyek
7. Target dan Indikator Pencapaian Proyek
8. Lokasi Pelaksanaan Proyek
9. Pelaksana, Penanggung Jawab dan Pembagian Kerja
10. Jangka waktu dan Jadwal Pelaksanaan Proyek
11. Rencana Pembiayaan
12. Rencana Penarikan Anggaran
13. Skema pelaksanaan kegiatan Per-Tahun
14. Rencana Pengadaan
15. Rencana Monitoring dan Evaluasi

16. Bukti/dokumen pendukung ketersediaan tanah pada tahun pelaksanaan, atau apabila dibutuhkan, rencana pengadaan tanah.

Dokumen Studi Kelapayan Proyek (DSKP)

1. Kajian Teknis
2. Kajian Ekonomi
3. Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial
4. Kajian Kelembagaan
5. Kajian Risiko
6. Kajian Potensi Pemanfaatan
7. Kajian Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

BAB III

PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PROYEK

3.1. PROSES PENGUSULAN SBSN TAHUN 2024

Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan fungsi Agama bertanggungjawab dalam penilaian proposal usulan SBSN tahun 2024 dengan berpedoman pada aspek Kepatuhan, Kelayakan, dan Kesiapan pelaksanaan proyek yang dicantumkan dalam proposal usulan. Penilaian dan perbaikan usulan oleh Kementerian agama dan satuan kerja pengusul menjadi dasar penyusunan list Daftar Penerima Proyek (DPP) SBSN Tahun 2024.

Pembiayaan SBSN TA 2024 difokuskan untuk penyelesaian target prioritas RPJMN 2020-2024 sehingga selaras dengan arahan kebijakan Presiden dimana proyek pembangunan infrastruktur harus selesai dan tuntas di tahun 2024; pemenuhan proyek lanjutan (*committed MYC*); dan diutamakan untuk proyek dengan kesiapan yang tinggi seperti kematangan perencanaan baik dari sisi kesiapan tanah, desain, kemampuan anggaran dan pelaksanaan.

Pembiayaan SBSN TA 2024 telah mempertimbangkan kebijakan moratorium pembangunan gedung kantor sehingga pembangunan gedung kantor harus melalui mekanisme ijin dari Presiden. Selain itu, usulan proyek harus mempertimbangkan bahwa penerima proyek adalah masyarakat, sehingga tidak diperkenankan usulan proyek yang outputnya hanya untuk ASN/internal Kementerian/Lembaga

Proses pengusulan proyek SBSN TA 2024 oleh Kemenag ke Bappenas dituangkan dalam 6 surat Sekjen Kemenag dan melalui 2 kali pembahasan trilateral meeting oleh Kementerian Keuangan

Proses pengusulan DPP SBSN Kementerian Agama tahun 2024 diusulkan melalui surat berikut:

- Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Agama nomor B-0187/SJ/B.I.1/KU.00/01/2023 tanggal 13 Januari 2023
- surat Sekretaris Jenderal nomor B-0388/SJ/B.I.1/KU.00/01/2023 tanggal 27 Januari 2023,
- surat Sekretaris Jenderal nomor 3431/A.A1/PR.07.04/2023 tanggal 31 Januari 2023
- surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-2240/SJB/B.I.1/KU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023
- surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-3256/SJB/B.I.1/KU/05/2023 tanggal 23 Mei 2023
- surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-4400/SJ/B.I.1/KU.00/06/2023 tanggal 14 Juni 2023

Pelaksana	Surat Sekjen 13 Januari		Surat Sekjen 3 Maret		Surat Sekjen 23 Mei	
	Jumlah	Alokasi	Jumlah	Alokasi	Jumlah	Alokasi
Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah	2.931.061.978.000	635	1.335.000.000	311		
Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	361.916.978.000	6	361.916.342.000	6	272.918.770.000	6
Revitalisasi dan Pembangunan PLHUT	172.267.152.000	55	172.267.152.000	55		
Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji	200.000.000	135	200.000.000	135		
Pusat Literasi Keagamaan Islam	154.136.390.230	1	124.806.183.755	1		
Sentra Pengembangan Kompetensi Masyarakat di Bidang Layanan Keagamaan dan Moderasi beragama	39.820.782.690	1	39.820.782.690	1		

Proses *Trilateral Meeting* dilaksanakan dilaksanakan dua kali melalui undangan Kementerian Keuangan

- 16 Januari 2023 *Trilateral Meeting* pertama membahas indikasi usulan awal proyek SBSN Kementerian Agama
- 9 Juni 2023 *Trilateral Meeting* kedua pembahasan Pagu Anggaran SBSN Proyek RAPBN TA 2024 Kementerian Agama

Catatan *Trilateral Meeting* pertama untuk proyek SBSN Kementerian Agama

- Terkait usulan Ditjen PHU, masih terdapat catatan untuk usulan proyek Asrama Haji yang masih bermasalah dengan kesiapan lahan dan jalan akses (Yogyakarta, Banten, dan Pariaman). Perlu dilakukan penajaman terhadap usulan yang telah disampaikan. Terkait usulan Ditjen Bimas, masih terdapat catatan pada usulan Pembangunan
- Balai Nikah dan Manasik Haji untuk 5 (lima) lokasi yang status tanahnya masih belum *clear*. Perlu dipilih lokasi yang secara kesiapan lahan jauh lebih matang. Terdapat catatan untuk mempertimbangkan usulan Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji di Sulawesi Selatan karena adanya kasus tukar guling asset SBSN yang belum selesai.
- Untuk Pembangunan PLKI, selama dapat dilaksanakan melalui skema SYC (tahap II) dan dengan tidak melibatkan komponen pengadaan peralatan secara impor maka usulan dapat dipertimbangkan.
- Terkait usulan Ditjen Pendis, nilai Indikasi yang disampaikan sangat besar sehingga diperlukan penajaman dengan mempertimbangkan kinerja tahun sebelumnya dan penyesuaian ruang lingkup sesuai kebijakan Direktorat Sektor, Bappenas.

- Terkait usulan Badan Litbang dan Diklat, harap telah mempertimbangkan pengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dan masih diperlukan pendalaman terkait grand desain dari proyek yang diusulkan dan arah kebijakan di internal Kementerian Agama

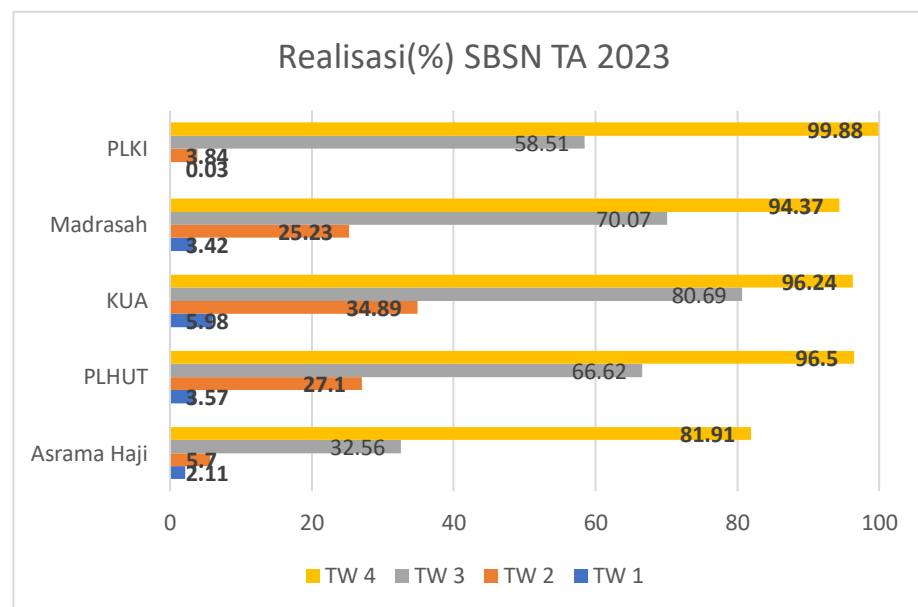
No	Proyek	Usulan Kemenag		Hasil Penelaahan Direktorat Sektor	
		Pagu (Rp)	Vol	Pagu (Rp)	Vol
A	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	2.931.061.978.000	635	1.335.000.000.000	311
1	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah	2.931.061.978.000	635	1.335.000.000.000	311
B	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	534.183.494.000	61	445.185.992.000	60
1	Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	361.916.342.000	6	272.918.840.000	5
2	Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu	172.267.152.000	55	172.267.152.000	55
C	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	324.806.183.755	136	324.806.183.755	136
1	Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji	200.000.000.000	135	200.000.000.000	135
2	Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI)	124.806.183.755	1	124.806.183.755	1
D	Badan Litbang dan Diklat	39.820.782.690	1	-	-
	Pembangunan Sentra Pengembangan Kompetensi Masyarakat di Bidang Layanan Keagamaan dan Moderasi Beragama	39.820.782.690	1	-	-
	Grand Total	3.829.872.438.445	833	2.104.992.175.755	507

Catatan *Trilateral Meeting* kedua untuk proyek SBSN Kementerian Agama

- Perlu perbaikan tata kelola aset SBSN di Provinsi Sulsel, sehingga 6 usulan SBSN KUA TA 2024 di provinsi Sulsel perlu diganti.
- Daftar usulan Madrasah yang belum ada di usulan sebelumnya (usulan 2,9 T dan usulan 1,8 T) perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam list dan mempertimbangkan urgensi madrasah lain yang sudah diusulkan sebelumnya
- Perlu disusun rencana penghapusan bangunan untuk usulan PLHUT dengan lahan yang masih terdapat bangunan lama
- Usulan Asrama Haji Kulon Progo belum bisa disetujui karena lahan belum siap bangun dan akses jalan menuju lokasi belum tersedia
- Rencana pembangunan Asrama Haji Kulon Progo belum diletakkan dalam *master plan* nasional Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji

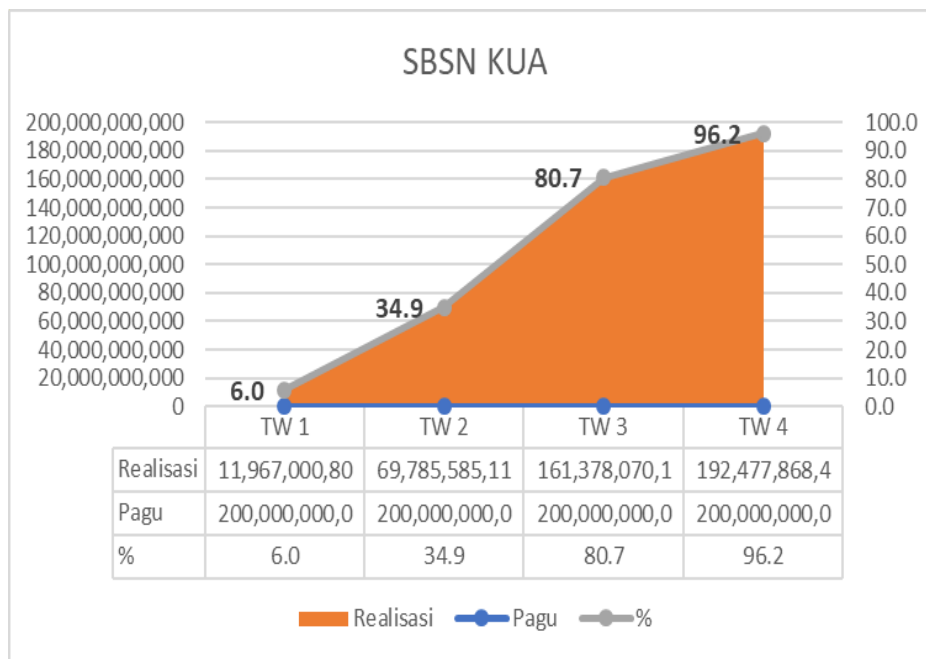
3.2. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PROYEK SBSN

Pemantauan pelaksanaan proyek SBSN dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh setiap Unit Eselon I Kementerian Agama yang menerima pembiayaan pembangunan melalui SBSN. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data realisasi/capaian yang dikerjakan serta untuk mengidentifikasi potensi terjadinya kendala/hambatan dalam pelaksanaan proyek. Pemantauan pelaksanaan proyek SBSN pada Kementerian Agama diselenggarakan dalam 4 triwulan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas ataupun Kementerian Agama



Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji

KUA Talamau Pasaman Barat di Sumbar dan PLHUT Pasaman di Sumbar, sama-sama memiliki realisasi terendah sampai awal triwulan 4 dikarenakan putus kontrak.



Pada Akhir Maret 2023 di Triwulan 1 realisasi SBSN KUA 6%. Progress Perencanaan dari 135 Proyek SBSN semuanya sudah menyelesaikan pekerjaan konsultan perencana, 46 Proyek sudah melakukan tanda tangan kontrak fisik, dan 17 proyek Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji yang sudah berkontrak fisik sudah menunjukkan progres pembangunan fisik. 89 dari Proyek SBSN KUA yang belum berkontrak fisik akan melakukan tanda tangan kontrak fisik pada April 2023 dengan beberapa progress seperti masih dalam Tahap lelang kontrak fisik, Dalam masa sanggah, menunggu jaminan pelaksanaan untuk berkontrak (KUA Danurejan, Yogyakarta), dan proses evaluasi administrasi dan pembuktian kualifikasi tender (KUA Kwadungan, KUA Sukodadi, Nglames).

3 KUA dengan progress tertinggi di Triwulan 1 sebagai berikut:

- KUA Adimulyo, Kebumen, Jateng sudah mulai pekerjaan fisik dengan persentase 23,88%
- KUA Sukoharjo, Pringsewu, Lampung sudah mulai pekerjaan fisik dengan persentase 20%
- KUA Abung Semuli, Lampung Utara sudah mulai pekerjaan fisik dengan persentase 35,64%

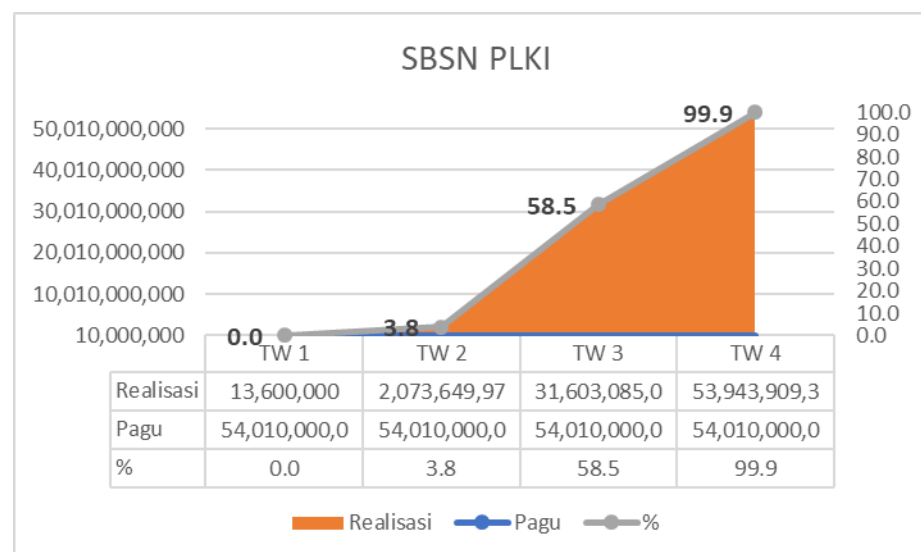
Pada Bulan Juni 2023 di Triwulan 2 terdapat 4 KUA yang sudah selesai 100% yaitu KUA Abung Semuli di Sumatera Utara, KUA Unaaha di Sulawesi Tenggara, KUA PLantungan di Jawa Tengah, dan KUA Adimulyo di Jawa Tengah, selain KUA tersebut ada 6 KUA lainnya yang realisasinya sudah di atas 80%.

Pada Bulan September 2023 di Triwulan 3, Pembangunan SBSN KUA menunjukkan peningkatan realisasi yang cukup signifikan, presentasi fisik mencapai 88%. 72 Proyek SBSN KUA dari 135 Proyek sudah menyelesaikan

progress fisik. 21 Proyek progress sudah diatas 90% dan sisanya dibawah 90%. Satu proyek progressnya cukup rendah yaitu KUA Lantung di NTB dengan progress 14,7% dengan kontrak pembangunan sampai 21 November, penyedia optimis dapat menyelesaikan sebelum akhir kontrak. Permasalahan lain juga terdapat di KUA Tutuk Tolu di Maluku yang memiliki progress fisik 38% sementara progress keuangan sudah 89% sehingga perlu dilakukan percepatan pembayaran di termin kedua.

Triwulan Keempat realisasi total KUA sudah mencapai 99,34% di akhir Tahun 2023, menyisakan KUA Talamau di Pasaman Barat, Sumatera Barat yang realisasinya masih 70,9% dikarenakan mengalami masalah gagal lelang dan lelang ulang untuk mendapatkan ganti penyedia.

Pembangunan Pusat Literasi Keagamaan Islam



Pada Akhir Maret 2023 di Triwulan 1 belum terdapat realisasi fisik pembangunan gedung proyek SBSN PLKI, realisasi anggaran pada Triwulan 1 sebesar 4,63% dengan progress pekerjaan sebagai berikut:

- Proses pengerjaan Konsultan Perencana sudah 36,5%. Adapun kontrak akan berakhir pada tanggal 21 April 2023
- Proses Pelelangan Konsultan Pengawasan dan Konstruksi yang akan dilaksanakan pada bulan April-Mei 2023 sedang dalam proses KAK, HPS dan Draft kontrak yang menjadi persyaratan lelang Konsultan
- Pengawasan sedang dalam tahan reviu tim teknis PPK dan akan segera disampaikan ke UKPBJ

Realisasi pada akhir bulan Juli 2023 sudah mencapai 58,5% dan keuangan sudah mencapai 40%. Proyek PLKI sudah mengusulkan optimalisasi untuk pengadaan genset dengan estimasi waktu pengadaan 1 bulan dan mesin jilid

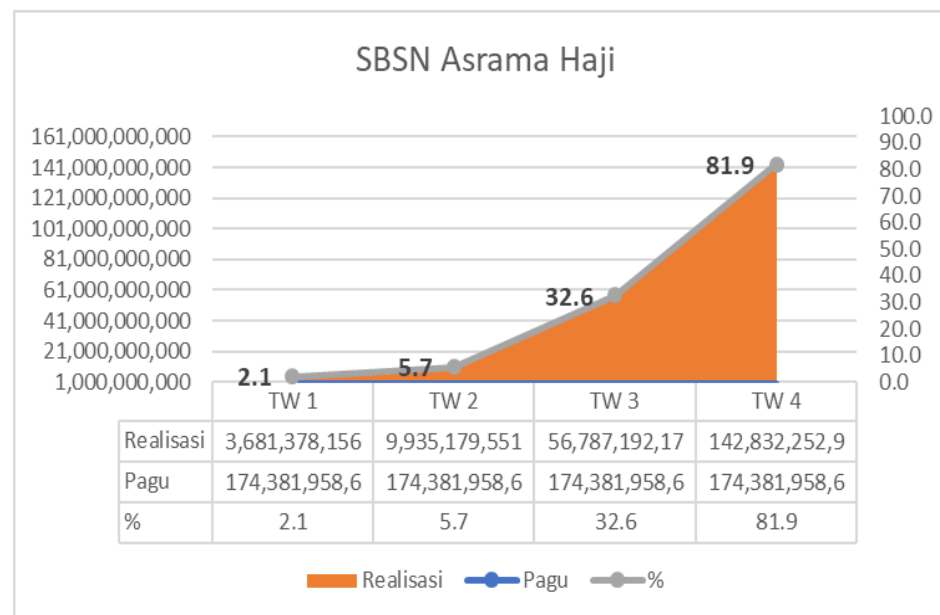
untuk huruf braile dengan estimasi waktu pengadaan 2,5 bulan, usulan optimalisasi akan dilakukan melalui e-katalog.

Pembangunan berakhir di tanggal selesai kontrak pada tanggal 02 Desember 2023 dengan 180 hari kalender dimulai dari tanggal awal kontrak di 6 Juni 2023, nilai kontrak awal sebesar 44 M dan nilai kontrak addendum sebesar 48M

progress penghapusan pembangunan TA 2024 akan segera dilakukan pada awal Triwulan 4 dan sudah mendapatkan surat dan KPKNL Bogor, proses pembongkaran gedung lama akan dikerjakan dengan estimasi pekerjaan berkisar antara 15 s.d 20 hari pengerjaan. pemenang bongkaran akan segera membersihkan sisa pekerjaan sisa dan meamastikan lahan clear di proyek 2023 untuk mempersiapkan pembangunan 2024.

Tender konsultan DED PLKI 2024 sudah selesai dan berkontrak menggunakan skema pembiayaan bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 2. 568.477.396. Tanggal kontrak 16 Oktober 2023 S.d. 14 Desember 2023 (60 Hari Kalender). Sudah dilakukan Pembahasan Schematic Design yang meliputi Alur Kendaraan, Alur Pengunjung, Lay Out Gedung dan Landscape, Fasad PLKI, Studi Elevasi, Pembahasan Struktur-Arsitek-MEP.

Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji



Terdapat 3 luncuran Asrama Haji Tahun 2022 ke 2023 Yaitu Asrama Haji Gorontalo, Sulawesi Barat dan Jawa Barat. Asrama Haji Gorontalo selesai pada tanggal 14 Januari 2023, Asrama Haji Sulawesi Barat selesai pada 13 Februari 2024 dan Asrama Haji Indramayu selesai di akhir waktu

perpanjangan 90 hari pada tanggal 31 Maret 2023. Terdapat 5 Proyek Asrama Haji yang dibangun melalui SBSN TA 2023, realisasi pada Triwulan 1 hanya untuk perencanaan sebanyak 2,1% dari total pagu kelima asrama haji. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan lelang akibat SK Pokja adalah rutin melakukan koordinasi dengan UKPBJ Kemenag.

Pada bulan Mei di Triwulan 2, beberapa Asrama Haji sudah melakukan kontrak perencanaan dan sedang melakukan lelang fisik.

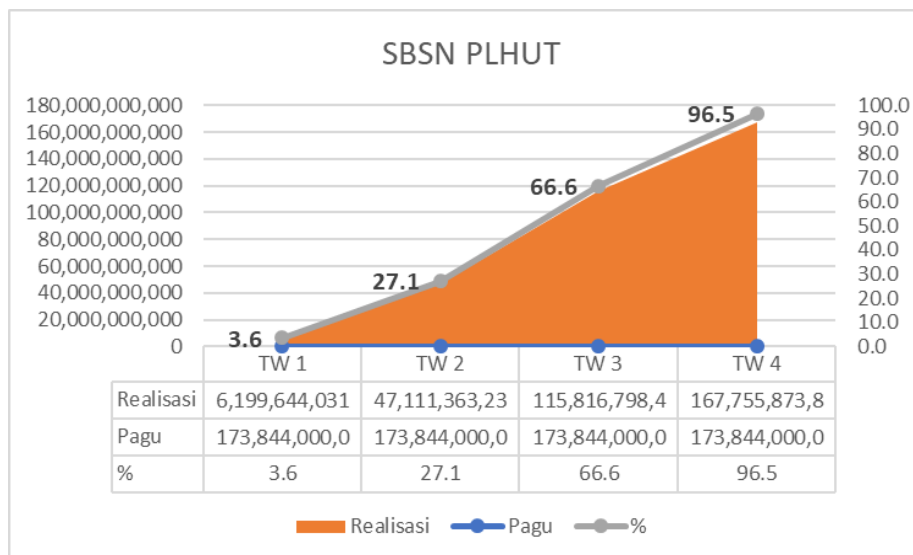
PEKERJAAN	PROGRES PENGADAAN			KETERANGAN
	SUDAH TENDER	BELUM TENDER	SELESAI TENDER	
PERENCANAAN	5	0	5	Balikpapan, Palangkaraya, Banten, Ternate dan Kupang
PENGAWASAN/IMK	5	0	1	Banten
KONTRUKSI FISIK	4	1	0	Kupang (Belum Tender)

Pada bulan September di Triwulan 3, semua proyek Asrama haji sudah melakukan pembangunan fisik dengan realisasi Asrama Haji Balikpapan 9,42%, Asrama Haji Kalimantan Tengah 44,71%, Asrama Haji Banten 20,16%, Asrama Haji Maluku Utara 9,05% dan Asrama Haji NTT 2,15%. Berikut rincian tanggal pelaksanaan lelang dan berakhirnya kontrak fisik.

NO	ASRAMA	PENGADAAN/TENDER BARANG DAN JASA				PELAKSANAAN			
		PERENCANAAN	PENGAWASAN	FISIK	MEUBEULAIR	KONTRAK FISIK	KONTRAK AKHIR	JUMLAH HARI	SISA HARI
1	BALIKPAPAN	20 Feb 2023	8 Jun 2023	8 Jun 2023	-	8 Jun 2023	31 Des 2023	207	124
2	PALANGKARAYA	6 Feb 2023	29 Mei 2023	29 Mei 2023	-	29 Mei 2023	25 Nov 2023	181	88
3	BANTEN	20 Jan 2023	20 Jan 2023	6 Jun 2023	12 Jul 2023	6 Jun 2023	27 Des 2023	205	120
4	TERNATE	12 Jan 2023	20 Jul 2023	20 Jul 2023	-	20 Jul 2023	31 Des 2023	165	124
5	KUPANG	16 Feb 2023	7 Jul 2023	7 Jul 2023	-	7 Jul 2023	31 Des 2023	178	124

Pada bulan Desember di triwulan 4, Kelima proyek Asrama Haji sudah mendekati penyelesaian pembangunan fisik dan segera melakukan penyelesaian administrasi anggaran. Asrama Haji Banten 83,36%, Asrama Haji Palangkaraya 99,80%, Asrama Haji Balikpapan 83,96%, Asrama Haji Ternate 99,36%, dan Asrama Haji NTT 99,85%.

Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu



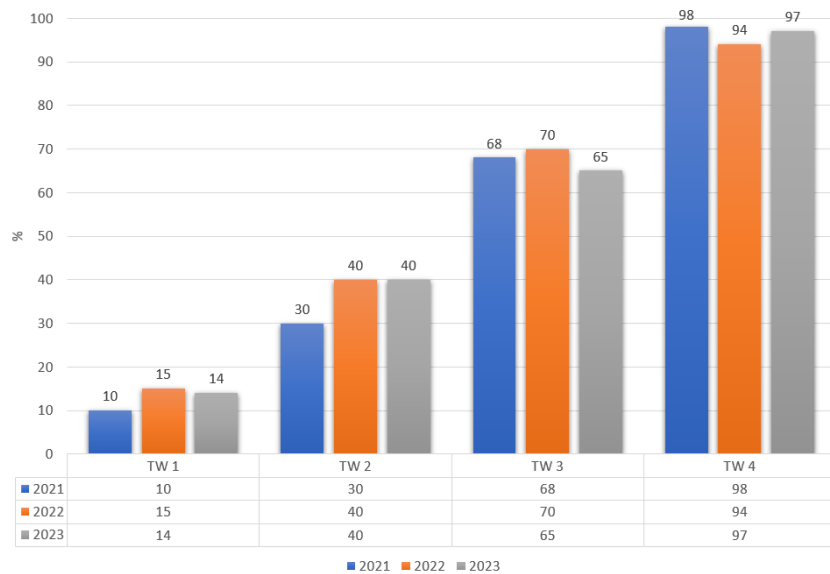
Pada Triwulan 1 di bulan Maret realisasi anggaran dari total 55 Proyek PLHUT di 25 Provinsi adalah 3,6%, sebagian besar sedang melaksanakan lelang fisik, dan sudah melaksanakan lelang perencanaan dan pengawasan.

Pada Triwulan 2 bulan Juni total realisasi anggaran di semua PLHUT adalah 27,1% dan realisasi konstruksi fisik 25,44%. Sisa hasil tender proyek SBSN PLHUT TA 2023 sudah direkap pada bulan Juni dan dicantumkan dalam surat usulan penggunaan optimalisasi ke Bappenas melalui Sekjen Kemenag. Rencana pemanfaatan/optimalisasi sisa hasil tender secara umum akan digunakan untuk pekerjaan tambah kurang (CCO), dan pekerjaan sarana pendukung seperti paving halaman dan pagar, dan tambahan pengadaan mebel/peralatan mesin untuk mengoptimalkan fungsi Gedung PLHUT.

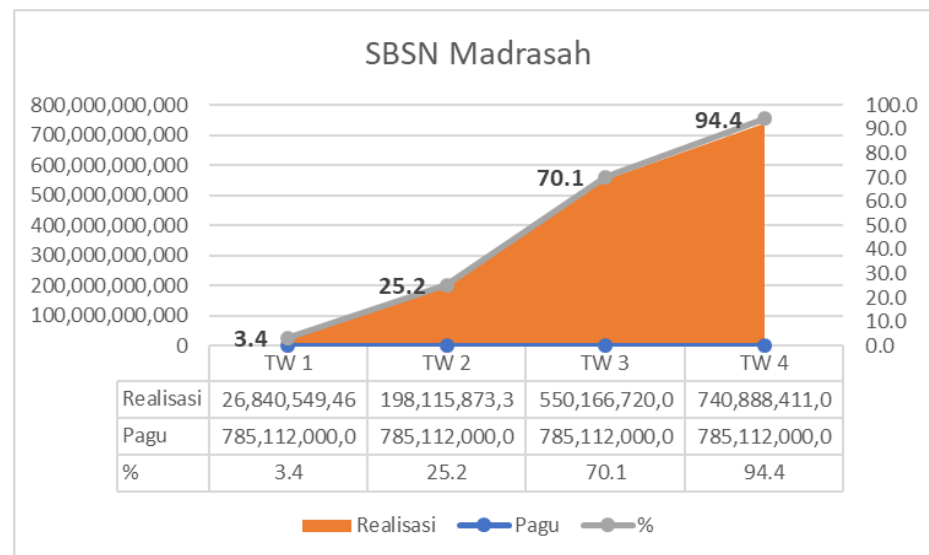
Pada Triwulan 3 bulan September total realisasi anggaran di semua PLHUT adalah 66,6% dan realisasi konstruksi fisik 74,51%. Terdapat 12 Proyek PLHUT yang sudah menyelesaikan pembangunan 100%, 34 PLHUT dengan realisasi 50-99%, 8 lokasi dengan progress 25-50%, dan 1 lokasi dengan progress 24% yaitu Kab. Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Pada Triwulan 4 bulan Desember total realisasi anggaran di semua PLHUT adalah 96,5% dengan progress fisik 97,01 %, 46 dari 55 PLHUT sudah menyelesaikan progress fisik 100% dan 8 lainnya memiliki realisasi diatas 80%, akan tetapi masih ada 1 PLHUT yang memiliki realisasi 18,22% yaitu PLHUT Kab. Pasaman yang mengalami gagal tender dan lelang ulang, PLHUT tersebut akan melaksanakan luncuran 90 hari kerja di tahun 2024.

Serapan PLHUT 2021 - 2023



Peningkatan Mutu dan Akses Madrasah



Pada Triwulan 1 di bulan Maret capaian hanya 3,4% dari total pagu 185 paket untuk perencanaan dan lelang pengawasan dan lelang konstruksi. Terdapat 5 Madrasah yang memiliki tanggal kontrak paling awal di 8 Maret 2023 dan 3 Madrasah di Kalimantan Tengah yang kontraknya selesai paling awal pada 1 Agustus 2023, dan 3 Madrasah di Provinsi NTT dengan selesai kontrak paling akhir pada tanggal 12 Desember 2023.

Pada Triwulan 2 di Bulan Juni , dari 185 paket konstruksi, 182 sudah selesai tender dan 3 paket sedang dalam tahap penandatanganan kontrak. 174 paket konstruksi sudah terdaftar di KPPM/Omspan dan 11 paket belum terdaftar, 11 paket tersebut 4 Madrasah dari Sumatera Barat, dan 7 Madrasah dari

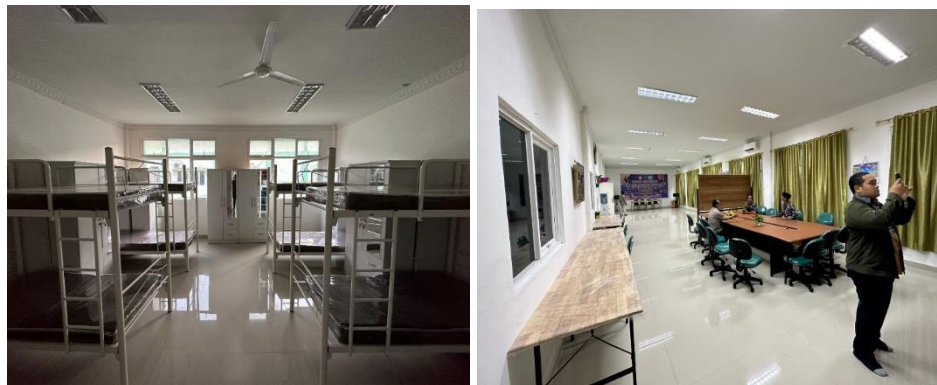
Sumatera Utara. Progress fisik secara keseluruhan mencapai 19,79%. Dari 185 Madrasah terdapat 49 Madrasah dengan sisa kontraktual melebihi 10%.

Pada Triwulan 3 di bulan September semua satker sudah melaksanakan pembangunan konstruksi fisik. Sebagian besar sudah melaksanakan kontrak peralatan dan meubelair, terdapat 10 Provinsi yang belum melaksanakan kontrak peralatan dan meubelair yaitu Aceh, Babel, Bengkulu, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Maluku, Sulteng, Sumbar dan Sumsel. Realisasi fisik sudah mencapai 69,01%, Provinsi dengan realisasi tertinggi adalah Lampung dengan 94,73%, disusul Jabar 90,70%, DKI Jakarta 83,76%, Kaltim 82,48% dan DIY 81,17%. 3 Provinsi Terendah dengan realisasi di bawah 30% adalah NTT, Sulteng dan Sumbar.

Pada Triwulan 4 di bulan Desember terdapat 20 Madrasah yang sudah selesai fisik 100%. Belanja Peralatan dan Mesin untuk semua proyek sudah mencapai 97,57%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencapai 95,71%.

Kunjungan Lapangan Pemantauan Proyek

MTsN 2 Kota Medan (11 April 2023)



MTsN 2 Kota Medan membutuhkan dan mengusulkan Lab dan Perpustakaan, akan tetapi diberikan anggaran SBSN untuk Asrama, saat ini program Asrama belum bisa berjalan

- **Temuan:**
 1. Proyek Proyek SBSN 2021: Pembangunan Asrama
 2. Pembangunan Asrama tipe 1, kapasitas 72 siswa , Masih belum mencakup kebutuhan
 3. Kondisi Kamar: 48 siswa , 24 double bed, 4 kamar, tampak tidak sering dipakai, memakai Kipas Angin (1 kamar 12 siswa)
 4. Awal mengusulkan Lab dan Perpustakaan karena belum punya, tapi oleh Kemenag diberikan Asrama
 5. Masih belum dipakai maksimal untuk program asrama
 6. belum ada santri maupun pengasuh, akan dibuka program asrama dalam waktu dekat, akan tetapi tidak inginap

7. Asrama Tidak sering digunakan, beberapa kali digunakan untuk pesantren kilat saja
 8. Program asrama; belum bisa dilakukan namun kondisi siswa kurang memadai dan ortu siswa , hanya 15 siswa yang berminat
 9. Program Asrama: Tahfidz, Qori', Pelatihan Aksioma , Kegiatan Pembelajaran
 10. Asrama perlu punya nilai lebih, tidak sekedar tempat menginap
 11. Pendaftar 100an, verifikasi 24 orang dan akan ada jalur Undangan (Asrama / Regiler)
 12. Belum ada subsidi silang (bisa diskusi dgn komite), jangan sampai asrama ini jadi eksklusif untuk yg berduit saja → bisa jalur subsidi bagi yang berprestasi
 13. Ada kendala air (airnya kuning karena struktur tanah)
- Saran Tindak Lanjut
 1. Perlu disusun Program Terencana untuk Asrama
 2. Pengembangan dan pembangunan perlu disesuaikan dengan roadmap yang sudah direncanakan
 3. Perlu dikaji di Sumut apakah ada tren : anak MI condong memilih masuk MTS? atau hanya Pragmatis (misal kerjaan, usia pendaftar berkurang, dll)

MIN 6 Medan (11 April 2023)



- Temuan:
 1. Proyek SBSN TA 2023 terdiri 1 paket 6 lokal untuk RKB
 2. Madrasah terdiri dari 18 Rombel, dan sudah tersedia 12 ruang kelas
 3. Terdapat rencanan proyek PUPR di sisi ujung bagian Gedung sekolah
 4. Direncanakan akan terdapat 22 Ruang kelas jika Proyek SBSN & PUPR dikerjakan
 5. Ada isu pembangunan dengan PUPR, belum dipastikan apakah MYC atau SYC
 6. Kondisi Lahan tidak terlalu luas

7. Master Plan belum ada, perlu dibuat MP untuk mengetahui pengembangan ke depan
 8. Perlu diperhatikan prinsip ketuntasan (misal kanopi, dll)
- Saran Tindak Lanjut
 1. Perlu kepastian pembangunan dari PUPR, agar tidak terjadi bentrokan pembangunan di waktu yang bersamaan
 2. Pemanfaatan ruang kelas jika mengalami kelebihan ruang kelas pasca pembangunan oleh PUPR
 3. Proses penghapusan Gedung lama perlu segera dilakukan
 4. Perlu izin dengan warga sekitar untuk pembangunan mengingat lokasi di tengah pemukiman padat

PLHUT Kota Malang (24 November 2023)



- Temuan:
 1. Proyek SBSN TA TA 2022 untuk pembangunan Gedung Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu
 2. Kendala pembangunan PLHUT: ada pergantian petuga ada perbedaan antara angka usulan dan angka yang didapatkan
 3. Sebagian besar sudah sesuai prototip, akan tetapi terdapat Penyesuaian ukuran bangunan yang lebih tinggi, (dibanding prototip), karena perlu menyesuaikan agar sejajar dengan lingkungan
 4. Terdapat program Manasik Sepanjang Tahun agar tidak tergantung KBIH (PLHUT: Daya tampung 100 orang dan ada kloter periodik, tidak harus yang berangkat tahun itu yang manasik
 5. Pelayanan Haji (Dampak SBSN), Sebelum: Dulu belum bisa menghadirkan Bank , jamaah daftar di Bank masing2, dulu ruang pelayanan bergabung dengan ruang petugas administrasi , pengarsipan & Siskohat beberapa kali terkendala lampu mati
 6. Sesudah SBSN Ada pelayanan satu atap, ada Bank, daya tampung naik (jadi 1400), pelayanan lebih baik, ruangan lebih luas, lebih Ramah Rentan, Pengarsipan & Siskohat sudah tidak terkendala

7. Layanan Bank : PLHUT menawarkan kerjasama (MoU) ke Bank Syariah, Bank yang mau harus membayar ke KPPN (sewa negara), dengan mempertimbangkan ruang
 8. Layanan Lain: Tidak ada kerjasama dengan Swasta (misal Tour n Travel), PLHUT harus netral
 9. Ada perbedaan pagu sebesar 3,2M di Kota Malang, 2,8M di Kota Batu: Dikarenakan porsi Jamaah dan wilayah layanan
- Saran Tindak Lanjut
 1. Perlu kepastian pembangunan dari PUPR, agar tidak terjadi bentrokan pembangunan di waktu yang bersamaan
 2. Pemanfaatan ruang kelas jika mengalami kelebihan ruang kelas pasca pembangunan oleh PUPR

Asrama Haji Banjarmasin (15 November 2023)



- Temuan:
 1. Proyek Tahun 2018 UPT Asrama Haji Banjarmasin mendapatkan SBSN sebesar Rp. 43,9M, namun kontraktor (PT. Reyka Mandiri) hanya mampu menyelesaikan konstruksi 48% di akhir luncuran 90 hari kerja.
 2. Progres pembayaran hasil reuiu KDP yang diproses adalah sebesar 46%.
 3. Tahun 2021 dilakukan pengerjaan pemasangan atap gedung menggunakan anggaran RM Rp322 juta untuk mencegah kerusakan bangunan.
 4. Tahun 2022 dilakukan penyelesaian sebagian bangunan dapur menggunakan anggaran PKOH Rp198 juta
 5. Kekurangan kamar di asrama menghambat kelancaran pelaksanaan pemberangkatan calon Jemaah haji, karena kloter yang ditampung tidak maksimal
 6. Sudah terbit hasil Reuiu Pisah Batas Nomor: PE.12.03/LHP-345/PW16/2/2022 tanggal 23 Oktober 2022 oleh BPKP dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Tidak ditemukan permasalahan terkait aspek sosial, aspek hukum, aspek teknis dan aspek administratif bangunan gedung KDP.

- b. Nilai pisah batas gedung/bangunan sebesar Rp. 17.072.926.103, sedangkan nilai proyeksi penyelesaian bangunan adalah sebesar Rp. 22.646.184.000 jika dihitung dengan meubeler sebesar Rp. 4.267.356.150 menjadi Rp.26.913.540.150
- Saran Tindak Lanjut
 1. Perlu dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Renbang Bappenas dan PHU Kemenag Pusat terkait penyelesaian KDP dan pengusulan SBSN tahun selanjutnya

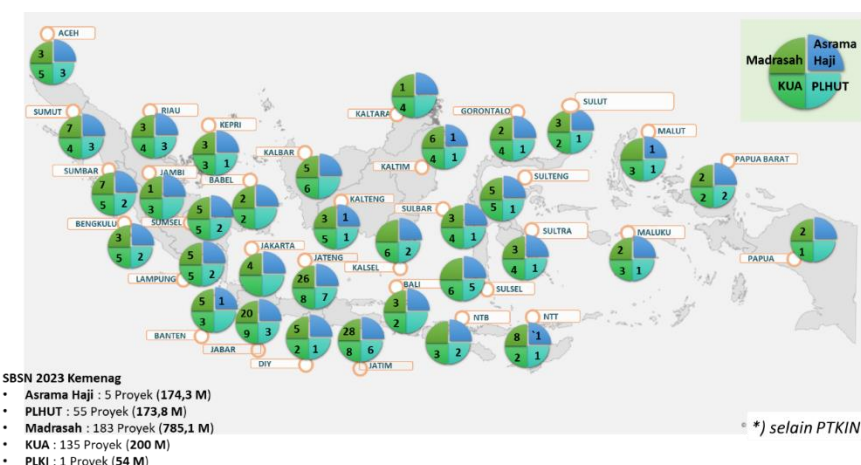
BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI PEMBIAYAAN PINJAMAN DAN HIBAH

4.1. PELAKSANAAN PROYEK SBSN KEMENTERIAN AGAMA

Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan fungsi Pendidikan dan Agama bertanggungjawab dalam melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan proyek SBSN. Monev tidak hanya dilakukan saat tahun pelaksanaan proyek, akan tetapi perlu dilakukan monev pemanfaatan pasca pembangunan, dan juga saat proses pengusulan proyek.

Pengusulan Pembangunan melalui proyek SBSN berpedoman pada roadmap yang telah disusun Kementerian Agama



Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji

Capaian realisasi anggaran pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji s/d tanggal 31 Desember 2023 adalah 96,2% dari 135 proyek, dan realisasi sampai 10 Januari 2024 adalah 99,64 persen. Terdapat 2 KUA yang meluncur ke 2024 dari Sumatera Barat yaitu KUA Tigo Nagari dari Pasaman dan KUA Talamau dari Pasaman.

KUA Tigo Nagari, Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat meluncur ke tahun 2024 karena saat selesai kontrak pada tanggal 31 Desember 2023 realisasi baru mencapai 90%, tanggal awal kontrak dengan PT. Bumi Sembilang Indah baru dimulai pada tanggal 8 Desember 2023 dan

meminta tambahan waktu pembangunan sampai tanggal 15 Januari 2024



Luncuran KUA ke 2024 selain Tigo Nagari, di Sumatera Barat juga terdapat KUA Talamau di Pasaman Barat. Realisasi saat tanggal akhir kontrak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 85% dengan tanggal awal kontrak pada tanggal 7 Desember 2023 dengan penyedia CV Three Brother. KUA mengajukan permohonan luncuran dengan kesepakatan penyelesaian proyek pada tanggal 23 Januari 2024.

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji, terdapat beberapa kendala yang menghambat pembangunan, diantaranya:

- Keterlambatan penyampaian data kontrak oleh satker disebabkan adanya permasalahan pada pendetailan COA (Claporan keuangan rinci dan mudah dipahami) di SAKTI
- Perhitungan kebutuhan pembangunan KUA yang tidak disebutkan lengkap pada RAB sehingga saat proses pelaksanaan mengalami kekurangan dan berpotensi menghasilkan bangunan yang tidak sesuai prototipe.
- Perubahan spesifikasi bangunan disebabkan anggaran dialihkan untuk penguatan pondasi dan pematangan lahan.
- Penyedia lambat dalam melakukan pengurusan untuk penyediaan penunjang Gedung seperti listrik dan air
- Keterlambatan pelaksanaan lelang, dan gagal lelang karena permasalahan pada penyedia pihak ketiga sehingga harus dilaksanakan tender ulang.

Berdasarkan hasil temuan kendala yang menghambat progress pembangunan proyek, maka ditentukan solusi sdan pembelajaran

sebagai perbaikan pelaksanaan tata kelola proyek kedepan, agar tujuan pembangunan proyek tercapai, antara lain:

- Perhitungan RAB secara matang dan detil agar saat pelaksanaan tidak kekurangan anggaran dan mengambil anggaran dari porsi lain..
- Bimas Islam perlu melakukan evaluasi terkait pagu pembangunan SBSN KUA
- Melakukan monitoring berkala untuk memastikan tercapainya penyelesaian proyek pembangunan tepat waktu atau lebih cepat.
- Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Bidang Urais dan KUA Kanwil penerima SBSN untuk memastikan kelancaran dan penyelesaian proyek tepat waktu
- Sebagian satker Kemenag Kabupaten/Kota penerima proyek SBSN bekerja sama dengan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam rangka monitoring pengawasan melekat pelaksanaan proyek pembangunan KUA. Langkah tersebut dapat dijadikan *best practices* untuk satker lain.

Pembangunan Pusat Literasi Keagamaan Islam

Serapan pembangunan PLKI sampai berakhirnya kontrak di 3 Desember 2023 mencapai 99,7% dari anggaran Rp54.010.000.000 untuk membangun Gedung percetakan Al-Quran sebagai area produksi yang terdiri dari beberapa area



- Area Produksi
Ruang pra cetak (*dummy*), ruang pentashih, ruang *Quality Control* (QC), ruang rapat produksi, Ruang proses produksi (peralatan mesin cetak dan finishing), ruang Kepala produksi, ruang admin
- Area Bahan Baku
Ruang penyimpanan bahan baku, ruang admin
- Area Packaging / Barang jadi
Ruang packaging, ruang penyimpanan barang, ruang barang rusak/sisa tidak terpakai, bangunan limbah kering, ruang admin
- Area Bongkar Muat
Ruang parkir alat angkut, ruang servis/perbaikan, ruang admin

- Ruang Pendukung: Mushola, Toilet

Pembangunan TA 2023 diselesaikan tepat waktu sesuai target mempertimbangkan segera dilaksanakannya pelaksanaan proyek PLKI TA 2024 dengan pagu dan beban kerja yang lebih besar. Pelaksanaan pembangunan Gedung PLKI pada tahun 2024 harus segera dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan UKPBJ Sekjen Kementerian Agama untuk pelaksanaan lelang Pra Dipa, hal tersebut untuk penyelesaian proyek tepat waktu sesuai batas waktu penyelesaian di bulan September.

Pada tahun 2024 Pembangunan Gedung utama PLKI melalui SBSN akan terdiri dari 4 lantai dengan anggaran 124,8 Milliar. Bangunan yang akan dibangun terdiri dari area perkantoran dan area literasi. Pengadaan mesin untuk peningkatan produksi rencananya akan dianggarkan melalui Rupiah murni (RM) Kemenag dan untuk Masjid dibangun melalui anggaran PNPB dan RM Kemenag. Rencana penyelesaiannya pada bulan November 2024, hal tersebut perlu dilakukan revisi karena batas penyelesaian proyek SBSN TA 2024 pada bulan September 2024.

PAGU SBSN TA 2024	
BIAYA KONSTRUKSI BANGUNAN	103,460,171,364
BIAYA MEBEL DAN INTERIOR	16,672,838,314
BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI	3,904,322,815
BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN	768,851,262
TOTAL	124,806,183,755

Selain keberhasilan pembangunan Gedung, Ditjen Bimas Islam memiliki PR yang cukup penting untuk pemanfaatan Gedung PLKI yang telah dibangun, pemanfaatan tersebut seharusnya sudah bisa dilaksanakan pada tahun 2025. Pengembangan UPQ menjadi PLKI diharapkan dapat digunakan sebagai basis pengembangan literasi dan membangun insan berkarakter dalam rangka mencapai kemajuan peradaban. Program PLKI yang akan disusun agar dapat diarahkan kepada

- Penguatan literasi keagamaan yang moderat dan toleran
- Fasilitasi literasi keagamaan inklusif: a) daerah terpencil; b) difabel
- Pengembangan literasi keagamaan berbasis digital untuk menangkal hoax

- Perlu fokus menasar pada usia produktif (15-64 tahun), khususnya kaum muda (21-36 tahun). Pada tahun 2020 terdapat 179,1 Juta usia produktif dan 63,5 Juta kaum muda (35,5%)
- Fokus pada upaya kolaboratif dalam meningkatkan jasa layanan pencetakan literasi keagamaan yang inklusif dan toleran
- Konsep pengembangan PLKI mampu mengintegrasikan konsep GLAM (Gallery, Library, Archive, dan Museum)



Gallery

Ruang seni budaya, baik terkait tulisan (kaligrafi), maupun bacaan (Qiroah)

Library

Pusat pengetahuan dan informasi keagamaan Islam

Archive

Koleksi segala bentuk & jenis cetakan Qu'ran/Kitab dari berbagai zaman

Museum

Pusat sejarah keislaman di Nusantara dan dunia

Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji

Capaian Realisasi Anggaran Pembangunan Revitalisasi Asrama Haji s/d tanggal 31 Desember Tahun 2023 adalah 81,9% dari pagu Rp174.381.958.000 untuk 5 Asrama Haji. Terdapat lunuran 2 Asrama haji yaitu Balikpapan (realisasi 31 Desember 90%), dan Kupang (realisasi 31 Desember 85%) lunuran tersebut dikarenakan kinerja penyedia yang dinilai kurang baik.

Beberapa kendala yang terjadi selama pelaksanaan proyek SBSN Asrama Haji diantaranya:

- Keterlambatan SK Pokja terbit
- Keterlambatan Kontrak Pra Dipa
- Keterlambatan kontrak fisik dan tidak sesuai dengan timeline perencanaan
- Keterbatasan tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia
- Terhambatnya distribusi bahan material yang menghambat progress kinerja

Solusi dan pembelajaran berdasarkan hasil temuan kendala yang menghambat pelaksanaan pembangunan proyek SBSN Asrama haji antara lain:

- Membuat Timeline lelang pengadaan dan segera Perlu melakukan koordinasi dengan UKPBJ terkait lamanya penerbitan SK Pokja.
- Masing-masing Satker konsisten dalam mengusulkan RPD setiap bulannya.
- Melakukan percepatan pencairan bagi penyedia yang telah menyelesaikan pekerjaan.
- Perlu dilakukan pelaporan yang lebih jelas mengenai kendala yang dihadapi di lapangan sehingga permasalahan bisa segera diselesaikan dengan Kementerian Pusat.
- Menambah Tenaga Kerja sesuai kebutuhan pekerjaan dan Waktu Kerja Sistem Shift
- Melakukan prioritas pekerjaan dan Melaksanakan pekerjaan system paralel antara pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur
- Melakukan Evaluasi Pekerjaan dan Tindak lanjut jika terdapat Deviasi Minus
- Melakukan rapat koordinasi berkala, Melakukan Pemantauan dan Rapat Koordinasi Perkembangan Pekerjaan Setiap Hari
- Melakukan Pemantauan secara berkala dan Percepatan Distribusi Material, Secara Intens sesuai kebutuhan pekerjaan
- Melakukan percepatan pengadaan barang yang membutuhkan waktu yang lama untuk distribusi dan instalasinya

Solusi tersebut perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan proyek kedepan sebagai langkah tindaklanjut dari kendala yang sering terjadi agar tujuan capaian pembangunan proyek tercapai dan selesai tepat waktu dengan hasil yang baik. Keberhasilan pembangunan revitalisasi Asrama dan pengembangan Asrama sangat berkaitan dengan tujuan awal pembangunan Asrama haji melalui SBSN yang bertujuan untuk (1) Mewujudkan peningkatan pelayanan akomodasi asrama haji yang multifungsi untuk kegiatan ibadah, social, ekonomi yang aman dan nyaman (2) Menciptakan suasana asri dengan penataan bangunan asrama haji, khususnya bangunan yang berusia tua dan tidak layak huni (3) Meningkatkan daya tampung untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Asrama Hajiyang setara dengan hotel berintang tiga dalam upaya mendukung kelancaran pelayanan operasional Haji dan diluar masa operasional haji (4) Memberikan suasana rekreasi bernuansa religi

yang dapat mendukung syiar Islam khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Ibadah Haji dan diluar pelaksanaan haji selama tinggal di asrama haji.

Dalam pengusulan pelaksanaan revitalisasi Ditjen PHU sudah menyusun studi pendahuluan tentang Usulan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji yang dibiayai SBSN sudah dibuat pada tahun 2019 namun pada tahun 2023 ada perubahan untuk disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan dan saat ini perlu disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan asrama haji sesuai roadmap 2025-2029. Kerangka Acuan Kerja dan DSKP Ditjen PHU juga sudah dibuat pada tahun 2019 dan perubahan dilakukan untuk disesuaikan dengan realisasi.

Revitalisasi Asrama haji Ditjen PHU perlu mengutamakan ketuntasan Asrama haji embarkasi terlebih dahulu, sebelum revitalisasi Asrama transit dan antara. Pemenuhan jumlah kamar untuk asrama perlu untuk memenuhi jumlah jamaah terbanyak dalam 1 hari yang akan menginap di embarkasi dan memastikan setiap jamaah terlayani dengan baik.

No.	Kategori Asrama Haji	Pengelompokan Standar Besaran Ruang Berdasar Kategori Asrama Haji	Kriteria Jumlah Jama'ah Terbanyak dalam 1 hari (orang)	Asrama Haji
1	Embarkasi	Tipe E.I	<500	<ul style="list-style-type: none"> Aceh Medan Padang <u>Tabing</u> Padang <u>Pariaman</u> Banjarmasin Indramayu
		Tipe E.II	500-1000	<ul style="list-style-type: none"> Banten Yogyakarta Lombok Balikpapan
		Tipe E.III	>1000	<ul style="list-style-type: none"> Jakarta Bekasi Surabaya Makassar
2	Antara	Tipe A.I	<600	<ul style="list-style-type: none"> Jambi Bengkulu Kep. Bangka Belitung
		Tipe A.II	>600	<ul style="list-style-type: none"> Riau Lampung Gorontalo
3	Transit	Tipe T.I	<400	<ul style="list-style-type: none"> <u>Palangka Raya</u> Tarakan <u>Palu</u> <u>Mamuju</u> Maluku Papua Papua Barat
		Tipe T.II	≥400	<ul style="list-style-type: none"> Semarang <u>Kupang</u> Pontianak Manado Kendari Ternate

Pengelompokan Asrama Haji

Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu

Capaian Realisasi Anggaran Pembangunan SBSN PLHUT s/d tanggal 31 Desember Tahun 2023 adalah 99,41% dari pagu Rp173,8 miliar untuk 55 proyek PLHUT. Terdapat luncheon 2 proyek PLHUT yaitu PLHUT Gresik (realisasi 31 Desember 96%), dan PLHUT Pasaman (realisasi 31 Desember 75%). PLHUT Pasaman terjadi gagal lelang sehingga perlu

dilakukan lelang ulang dan menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan proyek.

Beberapa kendala yang terjadi selama pelaksanaan proyek SBSN PLHUT diantaranya:

- Terjadinya putus kontrak yang mengganggu pelaksanaan proyek
- Kekurangan tenaga kerja dan keterlambatan pekerjaan dikarenakan libur dan gangguan cuaca
- Penyedia lambat, kekurangan tenaga kerja dan batas waktu pelaksanaan dan cuaca akhir tahun yang sering terjadi hujan deras.
- Keterbatasan dan kendala pengiriman bahan, material, peralatan
- Penyedia terjadi masalah keuangan dan kekurangan modal
- Tidak tertib dalam melakukan penarikan RPD setiap bulannya

Berdasarkan hasil temuan kendala yang menghambat progress pembangunan proyek, maka ditentukan solusi untuk menindaklanjuti kendala yang ada dan sebagai pembelajaran pelaksanaan proyek selanjutnya agar tujuan capaian pembangunan proyek tercapai dan selesai tepat waktu, antara lain:

- Melakukan monitoring berkala untuk memastikan tercapainya penyelesaian proyek pembangunan tepat waktu atau lebih cepat.
- Menegur penyedia, melakukan rapat rutin, monitoring bersama konsultan pengawas dan membuat target pelaksanaan per minggu dan per hari, menambah tenaga kerja dan jam kerja (shift) dan pekerjaan dilakukan secara parallel
- Menggunakan alternatif bahan dan material lokal dan mengantisipasi jadwal pengiriman
- Tidak menunda pembayaran sesuai termin
- Melakukan koordinasi, meminta review APIP dan menyusun jadwal penunjukkan penyedia baru

Selain proses pembangunan, perlu untuk dilakukan evaluasi terkait pelayanan dan pemilihan lokasi yang disusulkan dibangun Gedung PLHUT dengan memperhatikan hal berikut:

- Pelayanan PLHUT satu pintu perlu dibuat perencanaan konsep yang matang.

- Peningkatan PNBPN PLHUT dengan pemanfaatan lantai 2 secara maksimal
- Penguataan koordinasi dengan KUA setempat terkait pembagian pelaksanaan manasik di PLHUT, KUA dan Asrama Haji
- Pemanfaatan optimalisasi fungsi PLHUT untuk manasik terhadap peran fungsi manasik di KUA dan PLHUT
- Identifikasi dampak terhadap kebijakan setelah PLHUT dibangun (sehubungan dengan pelaksanaan fungsi lain di Kankemenag)

Penetapan lokasi usulan pembangunan gedung PLHUT didasarkan pada prioritas pembangunan yang ditentukan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:

- Data Layanan (bobot nilai: 40%)
- Daftar Tunggu Haji Reguler (bobot nilai: 30%)
- Kuota Haji (bobot nilai: 30%)
- Pertimbangan lainnya: Tidak Memiliki Gedung Kantor Sendiri, Daerah 3T, dll

Jumlah Kab/Kota	Realisasi 2019-2024	Target Indikasi 2025-2029					Total	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029		
514	253	55	55	55	55	41	261	Jumlah Lokasi
-	749	183	188	201	218	204	995	Jumlah Biaya (Miliar Rupiah)

Target Indikasi PLHUT berdasarkan Studi Pendahuluan

Peningkatan Mutu dan Akses Madrasah

Capaian Realisasi Anggaran Pembangunan SBSN Madrasah s/d tanggal 31 Desember Tahun 2023 adalah 99,6% dari pagu Rp724.148.484.255. Terdapat 1 luncuran Madrasah di MTsN 2 Tojo Una-una (realisasi 31 Desember 71%) luncuran tersebut dikarenakan kinerja penyedia yang dinilai kurang baik.

Beberapa kendala yang terjadi selama pelaksanaan proyek SBSN Madrasah diantaranya:

- Proses pemilihan penyedia mengalami kendala Hasil Evaluasi Pokja tidak diterima oleh PPK, sehingga beberapa proyek dilakukan lelang ulang.
- Saat Pra-Kontrak keterlambatan dalam menghitung sisa anggaran untuk diusulkan dalam CCO atau Optimalisasi

- Kondisi cuaca hujan, Kondisi tanah pondasi (berair, gambut, lempung), Mobilisasi Material lambat, Akses masuk lokasi sulit, dan Tenaga kerja tidak maksimal & Metode kerja kurang efektif
- Kondisi finansial kontraktor yang tidak mencukupi
- Saat Proses pencairan terjadi keterlambatan pendaftaran data supplier ke KPPN (SAKTI), Penjadwalan Rencana Penarikan Dana tidak tepat, serta Dokumen pencairan tidak lengkap.
- Serapan rendah dikarenakan Kontrak fisik baru dilaksanakan rata-rata pada bulan Juli, Kontrak tidak ada termin pembayaran Uang Muka, dan Kontraktor harus segera melakukan percepatan target progress fisik



Berdasarkan hasil temuan kendala yang menghambat progress pembangunan proyek, maka ditentukan solusi untuk menindaklanjuti kendala yang ada dan sebagai pembelajaran pelaksanaan proyek selanjutnya agar tujuan capaian pembangunan proyek tercapai dan selesai tepat waktu, antara lain:

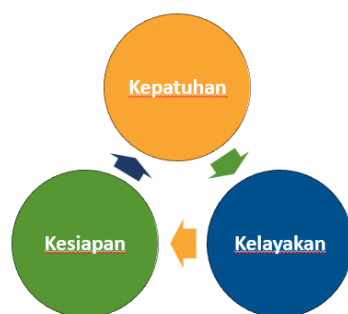
- Koordinasi dengan UKPBJ, agar proses pemilihan penyedia sesuai dengan jadwal
- Melakukan koordinasi pada masa sanggah, untuk persiapan kontrak.
- Percepatan Kontrak, pasca masa sanggah selesai.
- Meminimalkan kesalahan dokumen Jaminan, sehingga PPK bisa segera mencairkan jaminan uang muka;
- Perencanaan dan persiapan yang matang dan siap untuk dieksekusi dengan memperhatikan faktor resiko dan mitigasinya
- Kolaborasi antar pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah serta pihak penyedia
- Penggunaan teknologi dan inovasi konstruksi terkini yang efektif menyelesaikan proyek pembangunan
- Percepatan progress, dengan alat lebih modern dan mobilisasi material lebih cepat, serta pemberdayaan tenaga kerja yang efektif dan efisien

Selain pembangunan proyek, perlu dilakukan evaluasi dalam proses pengusulan Madrasah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Lahan clean and clear sebelum pembangunan
 1. Menghindari project delay akibat penyiapan lahan (single-year contract)
 2. Pembiayaan SBSN tidak bisa digunakan untuk penyiapan lahan
- Pembahasan output/ruang lingkup
 1. Penambahan ruangan dari proposal awal
 2. Mengutamakan pemenuhan komitmen awal
- Desain Gedung, Standar, dan Peralatan sesuai peruntukan
 3. Penetapan standar madrasah digital: Ruang kelas (ukuran, spesifikasi ruangan, peralatan dan mesin); Spesifikasi laboratorium komputer; Fasilitas lainnya.
 4. Prototipe ruang praktik dan laboratorium: Desain ruangan; Mesin dan peralatan sesuai dengan keahlian dan peruntukan; dan Standar bangunan/ruang dan peralatan
- Pemanfaatan SBSN untuk investasi (Gedung dan aset)
 1. Tidak dipergunakan untuk bahan habis pakai dan mudah berpindah
- Pemenuhan output awal dan kelengkapannya
 1. Memastikan ketercapaian target utama, serta segera dapat dimanfaatkan secara optimal setelah dibangun
- Kinerja Proyek SBSN
 1. Sebagai pertimbangan pengalokasian SBSN tahun berikutnya
 2. Menghindari proyek bermasalah/mangkrak/tidak selesai dan kaitannya dengan moratorium wilayah
 3. Prioritas pengusulan pada proyek/satker yang siap

Pengusulan SBSN Tahun 2024

Proses pengusulan proyek SBSN tahun 2024 sudah dilaksanakan pada tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi terkait pengusulan proyek di setiap tahun, berdasarkan proses pengusulan SBSN tahun sebelumnya dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pengusulan proyek SBSN.



Terpenuhiya seluruh kriteria dalam:

- KAK
- DSKP

Keterkaitan antar Proyek dan Kesesuaian :

- Tusi dan kewenangan
- RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Prioritas Nasional
- Lokasi dan RTRW

Pertimbangan:

- kebutuhan
- teknis
- ekonomi
- dampak sosial
- dampak lingkungan
- kelembagaan
- risiko
- potensi pemanfaatan
- Rencana pelaksanaan

Kelengkapan informasi pada masing-masing outline KAK/DSKP

- Kesesuaian lokasi Proyek dengan RTRW setempat
- Keterkaitan antar Proyek untuk melihat proyek lain yang terkait dengan pembangunan SBSN
- Rincian Anggaran Biaya, biasanya hanya ada rekapitulasi anggaran, perlu rincian per jenis Gedung
- Skema pelaksanaan per tahun dalam skema proyek SYC
- Rencana pengadaan perlu dicantumkan
- Rencana pemantauan dan evaluasi
- Rencana pengadaan tanah, apakah lahan sudah siap dan bersertifikat, tidak ada rencana pengadaan lahan baru

Substansi dalam KAK/DSKP

- Penyesuaian penulisan tahun di proposal, jadwal pelaksanaan, jadwal penyerapan, dsb, agar disesuaikan dengan tahun usulan

No	Agenda/Kegiatan	2023				2024								
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
1	Penyampaian Usulan Indikasi SBSN TA 2025 dari E selon I ke Setjen													
2	Pembahasan Usulan Indikasi Internal Kemendagri/ Pengecekan Dokumen Usulan Indikasi													
3	Pembahasan Awal Usulan Indikasi bersama Bappenas & Kemenkeu													
4	Perkiraan Kick Off Perencanaan SBSN TA 2025													
5	Penyampaian Usulan Indikasi SBSN TA 2025 (Minggu kedua Januari)													
6	Trilateral Meeting I													
7	Penetapan Indikasi 2025													
8	Pembahasan Hasil Trilateral Meeting I/Melengkapi Dokumen Usulan Indikasi													
9	Trilateral Meeting II													
10	Pembahasan Hasil Trilateral Meeting II/Finalisasi Usulan Indikasi													
11	Penetapan DPP SBSN TA 2025													
12	Penyampaian Rincian DPP TA 2025													

- Pelaksana, penanggung jawab, pembagian kerja, belum mencerminkan tata kelola baru melalui provinsi.
- KAK disusun tanpa menggambarkan berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan madrasah.
- Kaitan Proyek dan dukungannya terhadap Renstra Kemenag maupun Renstra Ditjen Pendis tidak dibahas
- Ruang lingkup usulan masih beragam, perlu disesuaikan dengan Surat Sekjen Kemenag.
- Usulan anggaran berbeda signifikan dari alokasi yang diusulkan

Dirjen Pendis

- Rencana Penarikan Dana (RPD) belum selaras dengan jadwal pelaksanaan Proyek
- Redaksi DSKP yang masih banyak menggunakan template (seragam)

Dokumen Pendukung sebagai pelengkap usulan

- Masterplan proyek
- Rekomtek PUPR
- Penyesuaian prototipe dengan kondisi lahan, dsb

PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Pelaksanaan lelang seawal mungkin
- Persiapan dokumen lelang lebih baik (HPS, spesifikasi)
- Mencari kontraktor yang 'baik' (*track record*, kapasitas modal dan alat, tidak hanya berdasar harga terendah)

PELAKSANAAN

- Penyusunan jadwal rinci pelaksanaan, termasuk RPD
- Pengawasan pekerjaan rekanan agar sesuai jadwal dan spesifikasi
- Rekomendasi perbaikan mekanisme pelaksanaan
- Memaksimalkan penyelesaian proyek di tahun pelaksanaan saja

PEMANFATAAN SISA LELANG

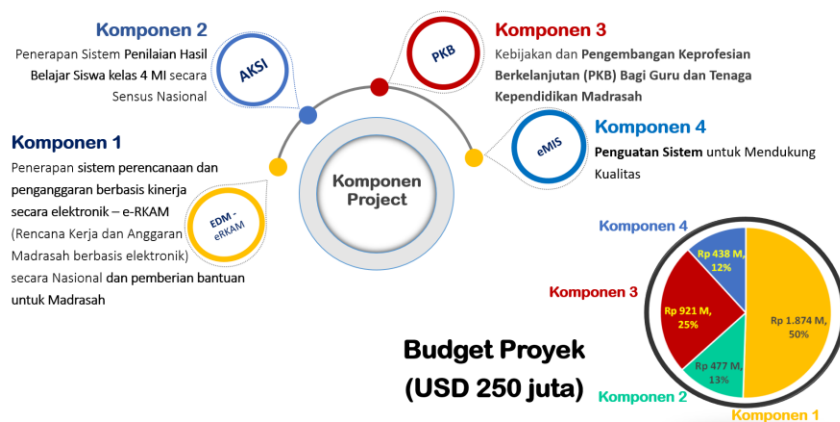
- Kebijakan berbasis pada dokumen Studi Pendahuluan
- Penyusunan rencana pemanfaatan sisa lelang
- Persiapan dokumen pendukung pengusulan
- Memastikan kapasitas pelaksanaan proyek/ ruang lingkup baru

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

- Pengukuran berkala pencapaian proyek berdasarkan jadwal
- Pendampingan dan penyelesaian segera permasalahan non-teknis
- Peringatan kepada proyek berkinerja lambat
- Penguatan sistem monev dan pelaporan

4.1. PELAKSANAAN PROYEK *REALIZING EDUCATION'S PROMISE MADRASAH EDUCATION QUALITY REFORM (REP-MEQR)* KEMENTERIAN AGAMA

Program Realizing Education's Promise Madrasah Education Quality Reform (MEQR) yang merupakan kegiatan peningkatan pengelolaan Madrasah kerja sama Kementerian Agama bersama World Bank sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Proyek Madrasah Education MEQR diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaksanaan Madrasah untuk mendukung pelaksanaan program transformasi digital Madrasah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui penggunaan platform e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik) dalam rangka mewujudkan Realizing Education's Promise Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) yang dalam pelaksanaannya dibagi kedalam 4 komponen.



Proyek MEQR dimulai pada tanggal 26 November 2019 dan proyek akan berhenti pada tanggal 31 Desember 2024. Proyek 4 tahun tersebut sudah dilaksanakan selama 3 tahun dan menyisakan 1 tahun dengan nilai serapan proyek sebesar US\$ 180.5 juta atau sekitar 72% dari total pinjaman sebesar US\$ 250. Berikut update pelaksanaan secara rinci dari 4 komponen MEQR pada akhir tahun 2023:

Komponen 1

- Terdapat 48.132 madrasah yang mengikuti pelatihan dan menggunakan aplikasi secara aktif hingga saat ini Hal ini telah melampaui target dimana 91,5% madrasah menggunakan hasil

evaluasi mandiri untuk penganggaran dan perencanaan. Adapun di tahun 2023 ini terdapat total 12.079 orang menerima Bimtek EDM-e-RKAM.

- Hingga saat ini, program BK/BA telah membantu total 7.847 madrasah. Di tahun ini, BK/BA Batch Kedua diberikan untuk 492 madrasah yang akan menyelesaikan pekerjaannya di akhir tahun ini. Adapun Batch ketiga sedang berlangsung untuk 352 madrasah dan terdapat penambahan kuota untuk 222 madrasah. Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas untuk menggunakan dana tahun ini, 5.951 peserta telah dan sedang mengikuti Bimtek BK/BA sampai akhir November 2023.
- Evaluasi EDM untuk pencapaian SPN telah selesai dan laporannya sedang dalam tahap finalisasi. Hasilnya menunjukkan skor SPN meningkat secara keseluruhan dari 71,86 di tahun 2021 menjadi 76,14 di tahun 2022. Data telah diperoleh dari 2.254 madrasah untuk evaluasi ini.
- Penerapan AG khusus untuk Cianjur sedang berlangsung. Dari 46 madrasah yang melaksanakan kegiatan pembangunan, 27 madrasah telah menyelesaikan pekerjaannya.

Komponen 2

- Meski dalam proses persiapan sempat terkendala, AKMI telah selesai dilaksanakan pada 14 Oktober 2023. Sebanyak 11.554 madrasah (90% peserta AKMI 2021) dan 343.437 siswa mengikuti kegiatan tersebut. Hasil AKMI diperkirakan akan keluar pada 17 November.
- Testimoni awal menunjukkan bahwa pelaksanaan AKMI 2023 menunjukkan perbaikan: minim laporan kendala teknis pada aplikasi (termasuk tampilan interface yang lebih baik untuk siswa) dan madrasah lebih siap untuk menyelenggarakan AKMI.
- Bimtek tindak lanjut AKMI saat ini sedang berjalan untuk sekitar 25.055 guru yang terdaftar, diharapkan selesai pada 30 November.
- PMU juga sudah mulai mengembangkan materi ujian MTs dan MA yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

Komponen 3

- Di Tahun 2023, 3.586 Pokja telah menerima bantuan (akumulasi total 12.784 Pokja). Bantuan tersebut mulai disalurkan pada bulan Juni, sehingga dapat memberikan waktu yang cukup bagi guru dalam melaksanakan kegiatan.
- Hingga Oktober 2023, sebanyak 778 calon kepala sekolah (325 di antaranya perempuan) dan 1.099 calon pengawas (517 di antaranya perempuan) telah dilatih. Selain itu, sebanyak 2.300 guru dan tenaga kependidikan di daerah 3T, 1.100 tenaga pustakawan dan laboratorium, serta guru pendidikan inklusif (GPK) telah mendapatkan pelatihan.

- Modul PKB untuk guru, kepala madrasah, dan pengawas telah selesai disusun (modul e-learning untuk guru PKB dengan Kurikulum Merdeka sedang dalam tahap finalisasi). Modul-modul ini akan diunggah ke LMS Kemenag agar dapat digunakan oleh Kelompok Kerja Guru (Pokja) pada tahun 2024

Komponen 4

- EMIS data accuracy audit sudah dilakukan dan diselesaikan dan telah dipresentasikan pada pertengahan Desember 2023.
- EMIS Change Management/Awareness Raising juga sedang berjalan dan akan diselesaikan pada akhir 2023 ini.
- Pengadaan cloud service telah selesai untuk kontrak sampai dengan akhir 2024
- Naskah akademis yang mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu diubah berdasarkan tinjauan PMA 90/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah telah selesai. Pembahasan draft RPMA telah mencapai 78,6% (110 dari 140 pasal)
- Peningkatan kapasitas bagi staf di seluruh kantor Kemenag di tingkat kabupaten/kota telah dimulai. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas staf dalam melaksanakan reformasi yang sedang berlangsung di kementerian: penganggaran dan perencanaan elektronik, penilaian siswa, pengelolaan data, dan PKB guru. Sekitar 1.100 staf akan menerima pelatihan, kegiatan diharapkan selesai pada tanggal 9 Desember
- MU telah memisahkan pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam proyek. PMU telah membagikan keseluruhan kerangka pemantauan dan evaluasi dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data. Kegiatan tersebut saat ini sedang berlangsung.
- Perusahaan yang melakukan evaluasi proses BKBA telah di-kontrak.
- PMU mulai menganalisis data awal dari kegiatan pemantauan; salah satu temuan awal menunjukkan sebagian besar madrasah (kepala sekolah dan guru inti) memahami substansi EDM, RKAM, dan e-RKAM, meskipun masih terdapat tantangan khususnya bagi madrasah yang jauh dari pusat perkotaan.

Pelaksanaan kegiatan relatif tepat waktu untuk mengejar target serapan di tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama (di antaranya BKBA, POKJA, AKMI) menunjukkan perbaikan dalam kualitas implementasi kegiatan. Kemungkinan sisa pinjaman sebesar USD 9,5 juta berdasarkan pengeluaran aktual saat ini dan proyeksi sisa jangka waktu pinjaman. Kemenag perlu memastikan bahwa implementasi proyek siap dilaksanakan dan anggaran siap digunakan mulai Bulan Januari mengingat proyek akan selesai pada tanggal 31 Desember 2024.

Perpanjangan proyek tidak memungkinkan baik bagi Pemerintah Indonesia maupun Bank Dunia.

Proyeksi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp963 miliar sedangkan alokasi DIPA saat ini sebesar Rp758 miliar. Pada akhir tahun rencana Kerja Tahunan (AWP) 2024 belum dikirim, didiskusikan, dan disepakati dengan Bank Dunia. PMU sudah seharusnya melakukan penyiapan KAK, petunjuk teknis, dan dokumen pengadaan lainnya perlu dimulai dari akhir tahun 2023. Sejalan dengan pelaksanaan 2024, pemerintah juga perlu menyiapkan Laporan Penyelesaian Implementasi (ICR) pada tahun terakhir implementasi proyek.

	Komponen	Kebutuhan Anggaran
1	Pelaksanaan sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik) Secara Nasional dan Pemberian Bantuan untuk Madrasah.	502.600.000.000
2	Penerapan Sistem Penilaian Hasil Belajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk Seluruh Peserta Didik Kelas 4 Secara Nasional.	96.997.992.000
3	Penguatan dan Perluasan Akses Untuk Kegiatan Kelompok Kerja Guru, Kepala Madrasah dan Pengawas.	77.008.000.000
4	Penguatan Sistem untuk Mendukung Pengembangan Kualitas.	82.088.292.000
	Total	758.694.284.000

Usulan Anggaran Tahun 2024

PMU perlu mengembangkan dan mendiskusikan dengan tim Bank Dunia kerangka kerja dan instrumen untuk pemantauan, evaluasi, dan penilaian dampak di Tahun 2024, yang juga termasuk hasil pelaksanaan MEQR selama ini. PMU perlu menyusun dan mendiskusikan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan dan didiskusikan dengan tim Bank Dunia. Pemantauan dan evaluasi idealnya diselesaikan setidaknya dua bulan sebelum penutupan proyek, sehingga hasil temuannya dapat dituangkan dalam Laporan Penyelesaian Implementasi (ICR) yang akan dirampungkan pada bulan Desember 2024.

4.2. PELAKSANAAN KERJASAMA RI-UNICEF BIDANG PENDIDIKAN

Pada tahun 2023, Kerja sama RI-UNICEF memasuki tahun ketiga atau pertengahan periode Multi Years Work Plan (MYWP) Program Kerja Sama Tahun 2021-2025. Tahun 2023 sekaligus menjadi tahun refleksi pelaksanaan paruh waktu kerja sama dan perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan baik itu yang wujudnya program maupun administrasi.

No	Indikator	Tahun Baseline	Nilai Baseline	2021	2022	2023	2024	2025
4.0.1	Persentase anak kelas satu SD yang pernah mengikuti PAUD - disgregasi berdasarkan jenis kelamin, lokasi, tingkat ekonomi, status disabilitas, dan indikator sosial-ekonomi lainnya yang tersedia	2018	63%	75%	74%	77%	72% target RPJMN	-
4.0.2	Angka penyelesaian sekolah: 1) Sekolah Dasar 2) Sekolah menengah pertama 3) Sekolah menengah atas - disgregasi berdasarkan jenis kelamin, lokasi, tingkat ekonomi, status disabilitas, dan indikator sosial-ekonomi lainnya yang tersedia	2018	1) 92% 2) 82% 3) 62%	1) 98% 2) 89% 3) 66%	1) 98% 2) 90% 3) 65%	1) 98% 2) 90% 3) 67%	1) 95% 2) 90% 3) 76% target RPJMN	-
4.0.3	Skor PISA 1) Membaca 2) Matematika disgregasi berdasarkan jenis kelamin, lokasi, tingkat ekonomi, status disabilitas, dan indikator sosial-ekonomi lainnya yang tersedia	2018	1) 371 2) 379	-	-	Belum tersedia	1) 396 2) 388 target RPJMN	-

Kerangka dan Capaian Program Kerja Sama RI-UNICEF

Pada tahun 2023 jika dilihat dari serapan anggaran dari status output. Kelima output yang ada pada Pokja Pendidikan menunjukkan status ontrack, dapat dilihat pada capaian yang tercantum pada table berikut:

Output	Status Output	Planned budget*) Rencana Berdasarkan Reviu Tengah Tahun (2023)		Utilisasi	
		Cash	TA+SA	Cash	TA+SA
		\$	\$	\$	\$
4.1 Anak Tidak Sekolah		340,000	761,494	148,015	446,906
4.2 Pendidikan Anak Usia Dini		394,500	1,674,860	62,546	541,919
4.3 Keterampilan Dasar		61,000	2,685,700	34,422	1,243,221
4.4 Keterampilan Abad 21		0	1,207,068	0	557,318
4.5 Pendidikan dalam Situasi Darurat		190,000	1,895,442	0	1,490
TOTAL		985,500	8,224,564	244,983	2,790,854

Terlepas dari dampak buruk pandemi terhadap pembelajaran anak, kemajuan terus dicapai dalam partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan tingkat penyelesaian sekolah, walaupun disertai dengan gambaran yang cukup beragam dalam hal pemulihan pembelajaran. Meskipun terdapat penurunan sebesar 1 persen (dari 75 menjadi 74 persen) antara tahun 2021 dan 2022 untuk proporsi anak yang duduk di kelas 1 SD dan pernah mengikuti PAUD, namun target tahun 2022 (sebesar 70 persen) telah terlampaui sebesar 4 persen.

Dua dari tiga sub-sektor pendidikan mengalami peningkatan pada angka penyelesaian sekolah. Untuk pendidikan dasar, tingkat penyelesaian 98 persen dicapai pada tahun 2022, melebihi target (94 persen) sebesar 4 persen; tingkat penyelesaian 90 persen dicapai untuk pendidikan menengah pertama, melebihi target (88 persen) sebesar 2 persen. Sayangnya, momentum pencapaian yang sama tidak terjadi pada pendidikan menengah atas, dengan tingkat penyelesaian sebesar 65

persen dari target 71 persen, yang berarti masih jauh dari target 2022 sebesar 6 persen.

Penanganan Anak Tidak Sekolah

Kemajuan program sesuai rencana. Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk membantu ATS semakin menguat, termasuk melalui perluasan praktik-praktik baik intervensi ATS ke 40 dari 45 kabupaten yang ditargetkan pada tahun 2023. Program ini menghasilkan upaya-upaya yang menyeluruh di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan ATS, yang berakibat pada dirumuskannya kebijakan-kebijakan yang relevan dan diprioritaskannya sumber daya pemerintah untuk mencegah sekitar 149.000 anak agar tidak putus sekolah dan memfasilitasi 36.840 dari 55.000 ATS yang teridentifikasi untuk kembali belajar.

Rancangan Peraturan Presiden untuk penanganan ATS beserta dokumen pendukungnya telah dikembangkan dan akan diserahkan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai usulan kebijakan yang diharapkan dapat diterbitkan pada tahun 2024. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran ATS telah diselesaikan dan siap untuk disahkan.

Adaptasi modul Kit Remaja sebagai instrumen untuk memperkenalkan pengembangan keterampilan abad-21 di layanan pendidikan non-formal (PNF) telah diselesaikan. Modul ini telah diadopsi sebagai modul pemberdayaan sosial untuk PNF dan rencananya akan diluncurkan dan disebarluaskan pada bulan Desember 2023. Modul ini akan diintegrasikan ke dalam platform online PNF (SETARA Daring), dan akan tersedia untuk umum.

No	Nama Indikator	Tahun	Nilai	2021	2022	2023	2024	2025
Output 4.1 Anak Tidak Sekolah								
4.1.1	Tersedianya kebijakan nasional (Peraturan Presiden) terkait ATS yang responsif gender	2018	Skor 2	Draft Peraturan Presiden atau kebijakan relevan lainnya terkait ATS tersedia	Peraturan presiden atau kebijakan terkait lainnya tentang ATS yang didukung dengan rencana uji cobanya diterbitkan	Peraturan presiden atau kebijakan terkait lainnya tentang ATS di ujicoba di wilayah tertentu	Peraturan presiden atau kebijakan terkait lainnya tentang ATS diujicoba di wilayah tertentu	4
4.1.2	Jumlah kabupaten dengan perencanaan dan anggaran untuk melaksanakan atau memperluas strategi-strategi penanganan ATS	2018	0	12	35	45	45 (53)	50 (60)
4.1.3	Tersedianya model pembelajaran alternatif bagi ATS yang inklusif dan responsif gender yang siap direplikasi	2018	Model tidak tersedia	Bukti (data dan informasi) sebagai basis untuk mendesain model tersedia	Pengembangan model jalur pembelajaran alternatif untuk ATS yang didukung dengan pedoman yang relevan.	Model jalur pembelajaran alternatif untuk ATS di ujicobakan di wilayah tertentu	Model jalur pembelajaran alternatif untuk ATS diujicobakan di wilayah tertentu	Model yang telah dievaluasi dengan kebijakan pendukung tersedia

Kerangka Kerja Sama Program PATS

Kemajuan Pelaksanaan Program tahun 2023 output 4.1

- Studi Pendidikan Non Formal (PNF) telah selesai dilaksanakan dan laporan studi telah tersedia. Temuan studi akan disebarluaskan dan digunakan sebagai basis untuk mengadvokasikan peningkatan kualitas layanan PNF.
- Draf akhir laporan Tinjauan Jangka Menengah SDG4 telah tersedia. Draf tersebut telah direviu oleh tim regional di UNESCO. Versi final laporan ini akan tersedia pada Desember 2023.
- Dukungan teknis bagi reviu nasional dan analisis data yang relevan, belum ada kegiatan yang dilakukan. Namun Direktorat APK, Bappenas, merupakan bagian dari tim inti dalam penyusunan laporan Tinjauan Jangka Menengah SDG4 di bawah koordinasi Kemendikbudristek.
- Sosialisasi dashboard ATS telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi selanjutnya akan dilakukan di Provinsi NTT dan Jawa Timur pada awal Desember 2023.
- Beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah telah menggunakan dashboard ini sebagai salah satu sumber data ATS untuk melengkapi data ATS yang telah dikumpulkan.

Outputs	Summary of AWP 2023				Utilization as of 20 November 2023				Line Ministry
	Cash	Technical Assistance	Supply Assistance	Total AWP	Cash	Technical Assistance	Supply Assistance	Total Utilization	
4.1	340,000	626,494	135,000	1,101,494	148,015	160,350	286,556	594,920	KEMENDIKBUDRT, BAPPENAS, KEMENDES, BANGDA
Grand Total				1,101,494				594,920	

Status Penggunaan Anggaran

Tantangan dalam pelaksanaan program penganan ATS Kerja sama RI-UNICEF diantaranya:

- Biaya tidak langsung pendidikan, khususnya biaya transportasi, menghambat keberlanjutan partisipasi pendidikan ATS yang telah kembali belajar karena banyak dari mereka menghadapi kesulitan geografis dalam mengakses pendidikan menengah, termasuk PNF.
- Di tingkat daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan layanan pendidikan seringkali menghambat upaya penanganan ATS, terutama pada kelompok usia sekolah menengah atas (16 – 18 tahun), karena beberapa pihak menafsirkan kebijakan ini secara sempit meskipun isu ATS merupakan tanggung jawab kolektif pemerintah di semua tingkatan.
- Banyak pemerintah desa yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan kapasitas serta sumber daya untuk memberikan kesempatan belajar bagi ATS.

Adapun tantangan tersebut juga menghasilkan peluang bagi pelaksanaan kedepannya, peluang tersebut diantaranya:

- Komitmen yang semakin kuat dari pemerintah daerah dan peningkatan alokasi sumber daya dari pihak pemerintah dan non-pemerintah (perusahaan dan Baznas) berperan penting dalam membantu mengatasi faktor ekonomi yang menjadi penyebab banyak anak putus sekolah.
- Mengacu pada praktik-praktik baik di Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi dapat memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan mempercepat tindakan kolaboratif di seluruh provinsi untuk penanganan ATS. Penetapan kebijakan yang relevan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi inisiatif semacam ini.
- Kolaborasi antara PNF (PKBM) dan pemerintah desa terbukti efektif memfasilitasi ATS untuk kembali belajar. Misalnya, PNF dapat memanfaatkan aula kantor desa untuk memberikan kelas tambahan kepada ATS (sehingga membuat layanan lebih mudah diakses), sementara pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia PNF dan sumber daya lainnya untuk memberikan kesempatan belajar kepada ATS di wilayah mereka.

Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)

Kemajuan program sudah sesuai rencana. Capaian Indeks Pengembangan Anak Usia Dini (ECDI2030) saat ini menjadi salah satu indikator dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan ECDI2030 ke dalam survei nasional berbasis populasi, sehingga memungkinkan pemerintah untuk memantau secara efektif pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pengembangan anak usia dini di Indonesia.

Replikasi program pembelajaran dan pengembangan anak usia dini telah berjalan di 24 kabupaten, dari 30 kabupaten yang ditargetkan pada tahun 2023 di provinsi Sulawesi Selatan, NTT, Papua, dan Papua Barat. Target akhir program kini disesuaikan dari 60 menjadi 45 kabupaten pada akhir tahun 2025, dengan mempertimbangkan keterbatasan operasional mitra pelaksana selama pandemi, berhentinya aktivitas Satuan PAUD secara nasional selama kurang lebih 21 bulan; dan kurangnya ketersediaan sumber daya yang menghambat perluasan program.

Adanya pengumpulan dan analisis data tentang kualitas layanan pembelajaran anak usia dini dan kesiapan sekolah di 6 kabupaten, dengan fokus pada pengukuran perkembangan anak, akan berkontribusi

pada pengembangan kebijakan dan anggaran nasional untuk pembelajaran anak usia dini, terutama untuk rencana kebijakan wajib belajar satu tahun pra-sekolah.

No	Indikator	Tahun	Nilai	2021	2022	2023	2024	2025
Output 4.2 Pendidikan Anak Usia Dini								
4.2.1	Status sistem pemantauan komprehensif untuk pendidikan pra-sekolah dasar yang mengukur dan mendata kualitas layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini	2018	0	1	1	1	1	1
4.2.2	Jumlah kabupaten dengan perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan atau peningkatan layanan pendidikan usia dini yang berkualitas	2018	2	5	20	30	34 (50)	45 (60)
4.2.3	Adanya kebijakan nasional, kepemimpinan dan anggaran untuk program pendidikan satu tahun pra-sekolah	2018	Score 1	Score 1	Score 2	Score 3	Score 3	Score 4

Kerangka Kerja Hasil Program PAUD

Kemajuan Pelaksanaan Program tahun 2023 output 4.1

- Pencapaian Indeks Pengembangan Anak Usia Dini (ECDI2030) telah dimasukkan sebagai indikator dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.
- Proyeksi hasil ECDI2030 telah dikembangkan oleh BPS untuk mendukung pengembangan RPJMN.
- Opsi dan alternatif implementasi ECDI2030 telah dibuat, termasuk melalui integrasi dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Pengumpulan Data Keluarga yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Kajian kesiapan sekolah dan keterampilan belajar dasar untuk anak usia dini telah selesai di 6 kabupaten (Bantaeng, Bone, Kupang, Timor Tengah Selatan, Asmat, dan Nabire) di 3 provinsi (Sulawesi Selatan, NTT, dan Papua).
- Kajian awal (*baseline*) perkembangan anak dan kesiapan sekolah untuk anak usia dini telah selesai di 2 kabupaten (Rote Ndao dan Sarmi) di 2 provinsi.
- Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten serta mitra lokal dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembelajaran dini untuk replikasi dan perluasan layanan pendidikan anak usia dini holistik integratif (PAUD-HI).
- Peraturan Gubernur Provinsi tentang PAUD-HI: Sulawesi Selatan: No. 5/2023, NTT: No. 22/2023
- Rencana Aksi Daerah PAUD-HI telah disusun di Sulawesi Selatan, diharapkan dapat disahkan pada akhir tahun 2023.

- Peraturan Bupati tentang PAUD-HI: Timor Tengah Selatan: No. 1/2023, Rote Ndao: Draf, diharapkan ditandatangani pada bulan Desember 2023
- Peraturan daerah di provinsi Papua dikembangkan untuk memastikan PAUD-HI direncanakan dan dianggarkan secara rutin dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus Papua (OTSUS). Draf peraturan telah diselesaikan dan menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri.
- Hingga saat ini, dukungan teknis telah diberikan untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD di 24 kabupaten, 53% dari total target 45 kabupaten pada akhir tahun 2025.
- Mendukung Kemendikbudristek dalam perencanaan advokasi dan komunikasi untuk transisi yang efektif dari pendidikan sekolah ke pendidikan dasar.
- Video pembelajaran mikro (*Micro-learning videos*) untuk literasi dan numerasi awal bagi anak usia 5-6 tahun dikembangkan dan diintegrasikan dengan platform pembelajaran guru (Platform Merdeka Mengajar PMM).
- Bappenas telah menyelesaikan laporan monitoring dan evaluasi untuk implementasi PAUD-HI, yang akan berfungsi sebagai dasar untuk menyempurnakan pedoman penyelenggaraan PAUD-HI.
- Modul Literasi Keuangan Keluarga beserta format digitalnya telah dikembangkan, dan masih dalam tahap uji coba dalam sistem manajemen pembelajaran (LMS) BKKBN untuk menjangkau lebih banyak orang tua dan pengasuh.
- Strategi *Social and behavior change communication* (SBCC) tentang pengasuhan sedang dikembangkan melalui kegiatan lokakarya, diskusi terpumpun, serta survey kepada orang tua di provinsi Aceh dan Jawa Timur. Strategi pengasuhan tingkat nasional ini akan difinalkan dan didiseminasikan oleh BKKBN pada Desember 2023.

Outputs	Summary of AWP 2023				Utilization as of 20 November 2023				Line Ministry
	Cash	Technical Assistance	Supply Assistance	Total AWP	Cash	Technical Assistance	Supply Assistance	Total Utilization	
4.2	394,500	1,065,060	609,800	2,069,360	62,546	65,099	476,820	604,466	KEMENDIKBUDRT, BAPPENAS, BPS
Grand Total				2,069,360				604,466	

Status Penggunaan Anggaran

Tantangan dalam pelaksanaan program PAUD Kerja sama RI-UNICEF diantaranya:

- Implementasi ECDI2030 dalam survei nasional seperti SUSENAS menghadapi beberapa kendala, termasuk diantaranya jumlah pertanyaan yang sudah cukup banyak dalam modul survey tersebut. Penambahan dan penghapusan (add and drop) pertanyaan pada kuesioner SUSENAS dapat menjadi pilihan untuk mengakomodasi daftar pertanyaan ECDI2030.
- Peran provinsi terkait PAUD-HI beserta nomenklatur anggarannya perlu diperjelas dalam mendukung prioritas anggaran layanan pengembangan anak usia dini. PAUD-HI saat ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam indikator Rencana Pembangunan Daerah Provinsi karena dianggap berada di bawah kewenangan kabupaten. Sehingga diperlukan panduan yang jelas tentang bagaimana pemerintah provinsi dapat menyediakan sumber daya untuk perluasan program PAUD-HI
- UNICEF memiliki akses terbatas untuk terlibat dalam pembahasan RUU atau Peraturan Daerah (Perda) tentang PAUD-HI, terutama selama proses pembahasan di parlemen/legislatif. Proses pembahasan perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dan secara efektif mendampingi sehingga pesan kunci PAUD-HI bisa tetap terakomodir dalam regulasi yang sedang dibuat.
- Terkait kebijakan satu tahun pra-sekolah, draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional saat ini masih belum ada kejelasan akan dibahas lebih lanjut di tingkat legislatif.

Adapun tantangan tersebut juga menghasilkan peluang bagi pelaksanaan kedepannya, peluang tersebut diantaranya:

- Perlu adanya opsi alternatif untuk implementasi ECDI2030, antara lain melalui Pengumpulan Data Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN.
- Sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) dan gugus tugas PAUD-HI, yang diharapkan dapat membantu proses Pengembangan program PAUD-HI di tingkat kabupaten/kota. Gugus tugas dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan regulasi yang sejalan dengan pedoman penyelenggaraan PAUD-HI.
- Draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 saat ini telah mencakup pendidikan pra-sekolah satu tahun sebagai bagian dari 13 tahun wajib belajar. Implementasi dari perencanaan ini memerlukan dukungan advokasi kebijakan serta penganggaran termasuk peningkatan pendanaan bagi program PAUD yang berbasis bukti.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Proses pelaksanaan review dokumen perencanaan dalam bentuk proposal untuk pengajuan proyek SBSN di tahun 2024, penanggung jawab pembangunan proyek di lokasi perlu memastikan dan memeriksa kembali dari proposal yang ada, selain mencegah penulisan usulan juga memastikan usulan yang dituliskan sudah sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Beberapa proposal belum lengkap untuk dinilai sampai akhir batas waktu sebelum dilaksanakannya Trilateral meeting pertama dengan Kementerian Keuangan. Penilaian berjenjang dari Kanwil dan Kemenag Pusat sampai ke Bappenas perlu dilakukan untuk memastikan proposal yang dikirimkan baik dan lengkap. Kelengkapan dokumen menjadi hal penting sebagai pertimbangan penyetujuan usulan sesuai dengan jumlah dan usulan pagu, sehingga Kementerian agama perlu untuk memastikan semua proposal yang dikirimkan ke Bappenas sudah lengkap sesuai persyaratan pengusulan proyek SBSN.

Masih terdapatnya sejumlah proyek SBSN yang diperkirakan tidak dapat selesai tepat waktu sebelum tanggal 31 Desember 2023, mengindikasikan adanya persiapan yang kurang optimal dari Kementerian Agama sebagai pelaksana proyek termasuk jajaran satker di daerah yang menangani langsung pembangunan proyek. Pembangunan melalui proyek SBSN di Kementerian Agama melalui SBSN Tahun 2023 belum sepenuhnya berjalan sesuai perencanaan karena adanya kendala baik dari sisi teknis maupun dari SDM yang mempengaruhi progress pembangunan yang tidak dapat selesai seluruhnya di akhir tahun pelaksanaan anggaran. Untuk sejumlah proyek yang berisiko selesai tidak tepat pada waktunya, mayoritas disebabkan karena pemilihan kontraktor yang bermasalah dari awal. Sejumlah proyek yang tidak dapat selesai sesuai jadwal ini dapat menjadi penilaian buruk bagi Kementerian/Lembaga terkait sebagai pelaksana khususnya pada unit perencanaannya karena hasil yang didapat tidak sesuai dokumen perencanaan yang telah dibuat.

Proyek pembangunan melalui SBSN, MEQR, dan Kerja sama RI-UNICEF relatif on-track, akan tetapi terdapat beberapa kendala yang perlu dijadikan pembelajaran bersama

Proses pengusulan optimalisasi sesuai permen PPN No.8 tahun 2020 yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 perlu diperbaiki terutama

dalam proses pematangan usulan dengan dilakukan pembahasan secara detil dan rinci antara Kementerian agama pusat dan satker serta kanwil penerima proyek sebelum usulan tersebut dikirimkan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Perlu penguatan kapasitas pelaksana proyek di level satker untuk memastikan proyek SBSN yang dilaksanakan tidak terkendala atau minimal satker sudah dapat mengidentifikasi potensi risiko dari awal pelaksanaan sehingga diketahui apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan potensi risiko tersebut. Selain itu, Unit Eselon I dipusat juga harus selalu memonitor dan mendampingi satker dalam melaksanakan proyek, utamanya untuk merubah budaya membayar dibelakang. Karena hal ini dapat memperlambat proses penyerapan realisasi anggaran yang kemudian juga dapat menyulitkan DJPPR Kementerian Keuangan dalam mencairkan anggaran jika dilakukan penarikan dana langsung dalam jumlah besar. Kementerian Agama untuk segera melakukan perbaikan proses penetapan kontraktor. Salah satunya melakukan fit and proper test bagi kontraktor yang ditunjuk untuk menangani proyek melalui SBSN, agar tidak terjadi keterlembatan pembangunan dan menghindari proyek mangkrak akibat ketidakmampuan kontraktor dalam menyelesaikan pembangunan.

Pelaksanaan Proyek MEQR di tahun 2023 selain pengukuran kinerja anggaran, aktivitas yang dilakukan juga perlu dilengkapi dengan pengukuran informasi kinerja hasil terhadap hasil/dampak Proyek MEQR yang telah ditetapkan apalagi proyek tersebut sudah memasuki tahun ketiga dan menyisakan 1 tahun terakhir sampai 2024. Proyek harus memberikan perhatian lebih pada aktivitas-aktivitas yang signifikan pengaruhnya terhadap kesuksesan proyek, tidak hanya dari aspek keluaran tapi juga hasil, atau bahkan dampak. Perlu ditingkatkan sinkronisasi pelaksanaan proyek antarkomponen, dari aspek tahapan kegiatan, sasaran, target, dan tata kelola untuk mendapatkan dampak positif yang signifikan. Pendekatan menyeluruh di satuan perlu dilakukan dengan intervensi dari semua komponen secara simultan ke beberapa madrasah uji coba, untuk kemudian dilihat perubahan yang terjadi pada kualitas pembelajaran di madrasah. Proyek dapat memberdayakan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota dalam mendorong kesuksesan proyek seperti sosialisasi mengenai pelaksanaan proyek, penciptaan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan proyek, verifikasi pemetaan kondisi madrasah hasil EDM dan e-RKAM, serta pemantauan dan pengendalian internal pelaksanaan proyek. Perlu penajaman desain program (sasaran, pedoman pelaksanaan, besar bantuan, pemanfaatan, evaluasi) dilihat dari bantuan afirmasi, bantuan

kinerja, Blockgrant kepada Kelompok Kerja GTK (KKG/MGMP/KKM/Pokjawas), dan tindak lanjut hasil AKMI. Usulan restrukturisasi yang diusulkan perlu dilakukan pembahasan intensif antar pimpinan di Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Bank Dunia mengingat usulan tersebut diluar perencanaan awal yang sudah diputuskan sebelum awal pelaksanaan di tahun 2019. Proses pengusulan Optimalisasi dan Restrukturisasi harus dilakukan percepatan agar sisa anggaran yang diusulkan tersebut dapat segera dimanfaatkan mengingat waktu penyelesaian proyek sudah menjelang akhir kontrak pelaksanaan.

Terkait penanganan ATS, Kementerian PPN/Bappenas, UNICEF dan Kementerian/Lembaga terkait yang disebutkan dalam Stranas ATS bersama-sama menyusun RPerpres Penanganan ATS yang dikoordinasikan oleh Bappenas. RPerpres tersebut sudah diajukan ke Sekretariat Negara melalui surat Menteri PPN dan menghasilkan rekomendasi Setneg yang akan ditindaklanjuti oleh Bappenas dengan mengundang K/L terkait untuk pematangan usulan RPerpres. Praktik-praktik baik program Anak Tidak Sekolah telah diperluas pelaksanaannya ke beberapa kabupaten dan mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah termasuk melalui pengalokasian sumber daya pemerintah daerah. Upaya-upaya penguatan program dan pengembangan kebijakan terkait Anak Tidak Sekolah di tingkat nasional sedang berlangsung untuk memfasilitasi terciptanya lingkungan yang mendukung untuk mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah secara nasional. Draft kebijakan tersebut saat ini sedang disusun dan nantinya akan dimintakan masukan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait, serta akan dilakukan ujicoba di beberapa daerah untuk melihat keefektifan kebijakan.

Sebagai upaya untuk mengidentifikasi isu Anak Tidak Sekolah, pemantauan di 33 Provinsi yang mencakup 122 Kab/Kota, 525 Kecamatan dan 921 Desa telah selesai dilakukan melalui SIPBM yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT yang memberikan gambaran tren putus sekolah pada anak dan remaja dari keluarga miskin serta usulan upaya-upaya potensial yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti hasil pemantauan. Pemerintah pusat perlu bekerjasama untuk mendorong daerah untuk memasukan program penanganan ATS dalam dokumen perencanaannya, Pemerintah pusat juga perlu menghasilkan sebuah peraturan sebagai advokasi dan dukungan teknis bagi pusat dan daerah dalam upaya penyebarluasan praktik penanganan ATS.

Terkait perogram Pendidikan Anak Usia Dini Kerja sama RI-UNICEF, capaian Indeks Pengembangan Anak Usia Dini (ECDI2030) saat ini

menjadi salah satu indikator dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan ECDI2030 ke dalam survei nasional berbasis populasi, sehingga memungkinkan pemerintah untuk memantau secara efektif pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pengembangan anak usia dini di Indonesia.

Program pengembangan anak usia dini yang mendukung implementasi kegiatan pendidikan anak usia dini, pengasuhan orangtua (parenting) dan dukungan pemantauan SDG juga menunjukkan kemajuan yang positif. Terutama pada dukungan untuk transisi yang efektif ke pendidikan dasar, program parenting berbasis masyarakat dan adaptasi ECDI 2030 untuk mengukur hasil perkembangan anak di Indonesia. Program ECDI 2030 perlu fokus mendukung pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan pedoman yang relevan untuk berkontribusi pada satu tahun pendidikan pra-sekolah dasar dan transisi yang efektif ke pendidikan dasar, peningkatan program PAUD HI di tingkat kabupaten, berbasis data dan informasi untuk mengukur kualitas hasil perkembangan anak usia dini.